

**ANALISIS PROGRAM RASKIN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam dan Bisnis Islam

Oleh :

**RAFIKA PRATIWI  
NPM : 1251010049**

**Jurusan : Ekonomi Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1437 H / 2016**

**ANALISIS PROGRAM RASKIN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**RAFIKA PRATIWI  
NPM : 1251010049**

**Jurusan : Ekonomi Islam**

**Pembimbing I : H. Supaijo, S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Ahmad Habibi, S.E., M.E.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1437 H / 2016**

## ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara perlu adanya program yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah program raskin, dimana program tersebut bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dan tercukupinya kebutuhan pangan. Di Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu kecamatan yang menerima bantuan program raskin sejak tahun 2002, mengingat masih banyak masyarakat di Kecamatan Sukoharjo yang dinyatakan belum mampu. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengetahui implementasi program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo menurut ekonomi Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program raskin dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo?, dan bagaimana implementasi program raskin menurut ekonomi Islam?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program raskin dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Sukoharjo, sehingga terjadinya kelestarian terhadap manfaat raskin dan untuk mengetahui implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo menurut nilai-nilai dasar ekonomi Islam

Penelitian ini di golongkan kedalam penelitian lapangan (*field research*), dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat penerima raskin di Kecamatan Sukoharjo dengan total penerimanya 2.018 RTS-PM. Dalam menentukan jumlah sampel menggunakan rumusan slovin dan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data diperoleh dengan cara menyebar kuisioner kepada 95 responden penerima raskin di Kecamatan Sukoharjo.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi, bahwa program raskin di Kecamatan Sukoharjo hanya memenuhi 2 indikator saja yaitu tepat jumlah dan tepat harga. Program raskin belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Sukoharjo, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa belum ada yang terpenuhi, karena program raskin di Kecamatan Sukoharjo hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin. Implementasi program raskin di Kecamatan sukoharjo dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar tafakkul (jaminan sosial) yaitu suatu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Let. Kol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

---

**PERSETUJUAN**

Setelah Tim mengoreksi, melakukan dan memberi masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama : Rafika Pratiwi**

**NPM : 1251010049**

**Jurusan / Fakultas : Ekonomi Islam / Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Judul Skripsi : Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan  
Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam  
(Studi Masyarakat Penerima Raskin Di Kecamatan  
Sukoharjo)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Supaijo, SH., M.H.**  
**NIP. 196503121994031002**

**Ahmad Habibi, S.E., M.E.**  
**NIP.1979051292000031001**

**Ketua  
Jurusan Ekonomi Islam**

**Madnasir, S.E., M.Si**  
**NIP. 19750424 200212 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

*Alamat : Jl.Let.Kol.H.Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

---

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul: “ ANALISIS PROGRAM RASKIN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Masyarakat Penerima Raskin Di Kecamatan Sukoharjo)” disusun oleh, Nama: Rafika Pratiwi, NPM: 1251010049, Jurusan: Ekonomi Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum’at / 21 Oktober 2016**

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Nasruddin, M.Ag</b>	<b>(.....)</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Suhendar, M. S. Ak</b>	<b>(.....)</b>
<b>Penguji I</b>	<b>: Heni Noviarita, M. Si</b>	<b>(.....)</b>
<b>Penguji II</b>	<b>: H. Supaijo, S.H., M.H</b>	<b>(.....)</b>

**Mengetahui,  
Dekan**

**Dr. Moh. Bahruddin, M.A  
NIP. 195808241989031003**

## MOTTO

وَعَاثَكُمْ مِّنْ ذَٰلِكَ سَالْتُمُوهُ ۚ وَنُتَعَاوِلُ بِعَمَتِ اللَّهِ ۚ تَحْصُوهُ إِنَّا الْإِنْسَانُ  
لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

*“Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu  
mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat  
kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat  
mengingkari (nikmat Allah). (Q.S. Ibrahim ; 34)”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*,  
(Banten: Kaltim, 2012), h.563

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis kecil ini. Sebagai tanda bakti cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Irvan dan Ibuku Tumiyatun yang selalu senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti, memberikan motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku, sehingga mengantarkanku meraih gelar sarjana.
2. Keluarga besarku tercinta dan mbahkung ku yang selalu memberikan do'a serta semangatnya selama ini.
3. Kedua adik laki-lakiku Muhammad Reza Alhabsyi dan Rafa Nadim Ukail, yang selalu aku sayangi dan cintai.
4. Sahabat-sahabat ekonomi Islam Meri Susanti, Jesi Syafitri, Asfiatul Fauziyah, Fhulan Mardhatillah, Siti Fadhlia, Nur Fitriani, Maratus Soimah, Laila M. Sari, Gilang Goemerlang, Wandha Khasta S, M. Riski Fauzi, serta sahabat-sahabat ekonomi Islam lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala semangat dan dukungan serta do'anya selama ini.
5. Untuk Iman Romansyah, S.E yang telah menemaniku dari pertama kulta hingga menjemput gelar sarjana, yang selalu memberi semangat dukungan dan doanya agar terselesaikannya skripsi ini
6. Serta almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dianugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Rafika Pratiwi. Dilahirkan di Pama-Salak pada tanggal 20 April 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Irvan dan Ibu Tumiyatun. Riwayat pendidikan penulis yang terselesaikan:

1. Pendidikan di SDN 01 Sinar Baru yang terselesaikan pada tahun 2006
2. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di MTs Negeri 02 Pringsewu yang terselesaikan pada tahun 2009
3. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Ma'arif 01 Kalirejo Lampung Tengah yang terselesaikan pada tahun 2012
4. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berkat dorongan dan dukungan dari ayahanda dan ibunda, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang perguruan tinggi yaitu IAIN Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Islam pada tahun 2012



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonomi Islam*” dapat diselesaikan, shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari’ah (S.E.Sy) dalam bidang ekonomi Islam.

Atas bantuan semua pihak dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Madnasir, S.E, M.S.i selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.

4. Bapak H. Supaijo, SH.,M.H dan Bapak Ahmad Habibi, S.E.,M.E. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Ibu Ngatmini S.Pd selaku Kepala BKKBN Kecamatan Sukoharjo dan seluruh anggotanya yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah dan ibu dan kedua adikku yang selalu mendo'akanku dan menjadi semangat hidupku
7. Seluruh keluarga besarku tercinta, Mbah Kung, nenek, emak, bapak, teteh, adikku Dikta Saftri, dan Iman Romansyah
8. Sahabat-sahabatku tercinta Meri Susanti, Jesi Safitri, Desi Nur Habibah, Wanda Khasta Subrata, Gilang yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman EI kelas B angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan hingga proses skripsi. Semoga kita selalu terikat dalam ukhuwal Islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

Bandar lampung, 19 September 2016

**Penulis**

**Rafika Pratiwi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Kesejahteraan Masyarakat .....	21
1. Pengertian Kesejahteraan .....	21
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat .....	23
3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam.....	27
a. Pengertian Kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam .....	27
b. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam .....	34
c. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam.....	41

B. Konsep Pengentasan Kemiskinan .....	43
1. Pengertian Kemiskinan.....	43
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	45
3. Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia .....	50
C. Program Beras untuk Masyarakat Miskin.....	60
1. Pengertian Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin).....	60
2. Tujuan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) .....	61
3. Sasaran Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) .....	62
4. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin .....	63
5. Pengelolaan dan Pengorganisasian .....	64

### **BAB III GAMBARAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	67
1. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo .....	67
a. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan .....	68
b. Arah Kebijakan Pengembangan .....	68
c. Potensi Perkembangan .....	69
2. Kondisi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo .....	70
a. Tingkat Kebutuhan Dasar .....	71
b. Tingkat Kehidupan .....	75
3. Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo.....	77
a. Sejarah Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo .....	77
b. Implementasi Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo .....	79
c. Mekanisme Penetapan Daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) .....	81
d. Mekanisme Penyaluran Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) .....	93

4. Karakteristik Responden .....	83
5. Hasil Jawaban Kuisisioner (Angket) Implementasi Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo .....	85

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) Kecamatan Sukoharjo .....	96
1. Tepat Sasaran.....	98
2. Tepat Jumlah .....	99
3. Tepat Harga .....	99
4. Tepat Waktu .....	100
5. Tepat Kualitas .....	100
6. Tepat Administrasi .....	101
B. Implementasi Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo..	105
1. Tingkat Kebutuhan Dasar .....	106
2. Tingkat Kehidupan .....	110
C. Implementasi Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo perspektif Ekonomi Islam .....	114
1. Keadilan .....	115
2. Tanggung Jawab .....	115
3. Tafakul ( Jaminan Sosial) .....	116

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. KESIMPULAN.....	115
1. Implementasi Program Raskin dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo .....	115
2. Implementasi Program Raskin dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo menurut Ekonomi Islam.....	116
B. Saran-Saran.....	117

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Beras Subsidi (raskin) di Kecamatan Sukoharjo .....	16
1.2	Jumlah Sampel Penelitian .....	17
1.3	Penentuan Sampel .....	18
3.1	Pola Konsumsi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo .....	71
3.2	Jumlah Prasarana Kesehatan di Kecamatan Sukoharjo.....	73
3.3	Pendapatan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo .....	75
3.4	Sarana Pendidikan di Sukoharjo.....	76
3.5	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pringsewu .....	77
3.6	Jumlah RTS Penerima Manfaat Beras RASKIN Tahun 2010-2014 ....	79
3.7	Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia .....	84
3.8	Pekerjaan Responden .....	84
3.9	Program Raskin .....	85
3.10	Program Raskin .....	86
3.11	Program Raskin .....	86
3.12	Ketepatan Harga Raskin .....	87
3.13	Ketepatan Kualitas Raskin .....	87
3.14	Ketepatan Sasaran Program Raskin .....	88
3.15	Ketepatan Sasaran Program Raskin .....	88
3.16	Ketepatan Sasaran Program Raskin .....	89
3.17	Ketepatan Administrasi Program Raskin .....	89
3.18	Ketepatan Administrasi Program Raskin .....	90
3.19	Ketepatan Waktu Program Raskin .....	90
3.20	Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat.....	91
3.21	Tingkat Kebutuhan Dasar (Makanan) Masyarakat .....	91
3.22	Tingkat Kebutuhan Dasar (Perumahan) Masyarakat .....	92
3.23	Tingkat Kesehatan Masyarakat .....	92
3.24	Tingkat Perlindungan .....	93
3.25	Tingkat Pendapatan Masyarakat .....	93
3.26	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	94
3.27	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	94
3.28	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	95

3.29	Skala Perekonomian Masyarakat .....	95
4.1	Jumlah RTS Penerima Manfaat Beras Raskin Tahun 2010-2014.....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari proposal ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul tersebut. Adapun judul ini adalah: **“Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam”** (Studi pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo), dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Secara bahasa, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya sebab musabab dan duduk perkaranya.<sup>1</sup>

#### **2. Program**

Program adalah hasil dari rancangan mengenai usaha yang telah disusun sedemikian rupa oleh seseorang atau suatu kelompok.

---

<sup>1</sup> Biatna Dulbert Tampubolon “*Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan Sni 19-9001-2001*”. Jurnal Standardisasi Vol. 9 No. 3 Tahun 2007, hlm 106



### 3. Raskin

Adalah salah satu program pemerintah untuk rakyat miskin yang diselenggarakan oleh perum BULOG untuk menjual beras dengan harga murah yang disubsidi.<sup>2</sup>

### 4. Kesejahteraan

Adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik baiknya bagi dirinya, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.<sup>3</sup>

### 5. Masyarakat

Adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, secara hukum masyarakat adalah menurut hukumnya sendiri, masyarakat yang memiliki mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri atau yang bekerja di sektor administrasi pemerintah.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai

---

<sup>2</sup> Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari, Mayarni, "Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat" *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012*, h. 59

<sup>3</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Cetakan Pertama*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010, h. 309

kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.<sup>4</sup>

## 6. Ekonomi Islam

Menurut Hasamuzzaman Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam atau membawa ekonomi sejalan dengan syari'ah.

Ekonomi islam adalah ilmu tentang asas-asas memproduksi, mendistribusikan, dan memakai barang-barang serta kekayaan, sebagaimana yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan Hadits.<sup>5</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu pelaksanaan program Beras Miskin (Raskin) yang diupayakan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo.

## B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Mengingat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan atau program yaitu program beras

---

<sup>4</sup>Soerjono, Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.15

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan ANdi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.52

untuk masyarakat miskin (raskin) yang merupakan bentuk perlindungan sosial dan juga merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah diadakan observasi *prasurvey* pada Kecamatan Sukoharjo banyaknya masyarakat penerima raskin atau rumah tangga miskin yang belum mengetahui manfaat dan tujuan program raskin, sehingga terjadinya kesenjangan pada implementasi program raskin. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini.

## **2. Alasan Subjektif**

Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi program beras miskin (raskin) terhadap kesejahteraan masyarakat, mengingat literatur dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup tersedia.

Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi Islam serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

## **C. Latar belakang**

Kesejahteraan merupakan cita-cita setiap manusia, bangsa, dan negara. Namun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa, dan negara harus menempuh jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan filosofi untuk apa negara itu didirikan.

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Masalah yang paling besar dihadapi setiap negara adalah kemiskinan.<sup>7</sup> Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan yang rendah.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian

<sup>7</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konsitusi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.14

mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.<sup>8</sup>

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat Islam pun menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya, jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupaakan AllahSWT dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaannya menjadikan seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah SWT maupun manusia lainnya, ada beberapa bentuk kedzaliman seperti dzalim kepada Allah SWT, manusia, dan dzalim kepada dirinya sendiri.<sup>9</sup>

وَعَائِدَةُ مِرْكٍ مَا سَأَلُونِ إِنْ وَلَّوْا بَعْدَ أَكْثَرِ لَوْلَا تَخْضُوعُ الْإِنْسَانِ لظُلُومِ كَقَارِو

Artinya : *Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah) (QS Ibrahim 14: 34)*

Pernyataan ayat diatas dikemukakannya setelah menyebutkan aneka nikmat Allah, seperti langit, bumi, hujan, laut bulan, matahari dan sebagainya.

<sup>8</sup>Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional", Jurnal Kesehatan Masyarakat, UNDIP, Semarang. h. 1-3

<sup>9</sup> Nurul Huda, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam, Kencana, Jakarta, 2015, h. 20-21

Sumberdaya alam yang disiapkan Allah untuk umat manusia tidak terhingga dan tidak terbatas. Seandainya sesuatu telah habis, maka ada *alternatif* lain yang disediakan Allah selama manusia berusaha. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk berkata bahwa sumberdaya alam terbatas. Tetapi sikap manusia terhadap pihak lain, dan sikapnya terhadap dirinya itulah yang menjadikan sebagian manusia tidak memperoleh sumber daya alam tersebut. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidak seimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam itu, yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan sikap aniaya, atau karena keengganan manusia menggali sumberdaya alam untuk mengangkatnya kepermukaan, atau untuk menemukan *alternatif* pengganti. Dan kedua hal terakhir inilah yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan sifat *kufur*.<sup>10</sup>

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin 27.727.780 jiwa, kemudian pada tahun 2014 berjumlah 28.513.570 jiwa.<sup>11</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dari tahun 2013 ketahun 2014 mengalami peningkatan.

Dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka secara tidak langsung sudah kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin. Berdasarkan pernyataan diatas sehingga dalam mengatasi kemiskinan

---

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung, 2014, h.594

<sup>11</sup> <http://www.bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/1119>, akses 30 Januari 2016

pemerintah Indonesia saat ini memiliki beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi 3 Kluster, yaitu :

1. Kluster I yaitu Bantuan dan perlindungan sosial (Program Raskin, Jamkesmas, Beasiswamiskin),
2. Kluster II yaitu Pemberdayaan Masyarakat (Program PNPM Mandiri),
3. Kluster III yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).<sup>12</sup>

Program Raskin merupakan bentuk subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Penyaluran Raskin (Beras untuk masyarakat miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan

---

<sup>12</sup>Zulfa Emilia, "Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Raskin di kota Bandar Lampung" *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.vol.6 edisi 1 Februari 2013, h.46

<sup>13</sup><http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-miskin/diakses> tanggal 18 Mei 2016,page 1

raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*Social Safety Net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.<sup>14</sup>

Di Provinsi Lampung hampir keseluruhan kecamatan yang tersebar di setiap kabupatennya sudah menerima bantuan raskin. Dan Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu Kecamatan yang berada pada Kabupaten Pringsewu sudah sejak lama menerima bantuan ini. Masyarakat Kecamatan Sukoharjo tergolong masih banyak yang menerima bantuan raskin yaitu sejumlah 2.180 RTS. Mata pencaharian masyarakat lebih mendominasi pada sektor pertanian seperti sawah dan ladang. Sebagian lainnya menggantungkan hidupnya pada hasil buruh, berdagang, membuka industri rumahan, dan lain-lain. Sektor pertanian yang lebih mendominasi akan tetapi kecamatan ini masih saja terpuruk dalam hal pangan, terbukti dengan peningkatan penerima Raskin pada setiap tahunnya. Tingkat pendidikan masyarakatnya masih cukup rendah terutama pada daerah-daerah terpencil yang tidak dibarengi dengan keahlian kreatifitas menjadikan banyaknya pengangguran pada masyarakat. Gagal panen adalah sala satu alasan pokok rendahnya pendapatan masyarakat. Buruh serabutan bagi masyarakat menjadikan pendapatan setiap harinya tidak

---

<sup>14</sup> [Http://bulog.co.id/sekilas-raskin/](http://bulog.co.id/sekilas-raskin/), page 1 diakses tanggal 27 oktober 2016



pernah menentu hanya bisa dikatakan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu hari saja, dengan memiliki pendapatan yang rendah sulit untuk dikatakan bagi mereka untuk membuka suatu lapangan pekerjaan. Masyarakat lanjut usia yang sudah tidak produktif lagi penyumbang banyaknya penerima raskin di Kecamatan Sukoharjo. Dengan adanya program Raskin di Kecamatan Sukoharjo dapat menekan beban pengeluaran terutama dalam pembelian beras dan jika tujuan raskin dapat terlaksana dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup>

Maka dari itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi pogram raskin di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2010-2014, sehingga mampu menanggulangi kemiskinan dan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Raskin dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo?
2. Bagaimana implementasi program Raskin dalam perspektif ekonomi Islam?

---

<sup>15</sup> Erli S.E, "wawancara prasurvey di kantor BKKBN Kecamatan Sukoharjo"

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi program raskin dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima raskin di Kecamatan Sukoharjo, sehingga terjadi kelestarian terhadap manfaat Raskin.
- b. Untuk mengetahui implementasi program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Kecamatan Sukoharjo menurut ekonomi Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan dalam kajian program Raskin dan sekaligus dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang implementasinya.
- b. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada lembaga pemerintahan Kecamatan Sukoharjo, dalam rangka

meningkatkan dan mengembangkan program Raskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Mengetahui keadaan sebenarnya mengenai penerapan program Raskin dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukoharjo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif menurut Kark dan Milles adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>17</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bersifat menggambarkan suatu hal secara objektif. Menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari

---

<sup>16</sup>Soetrisno Hadi, *Metode Research*. I.Andi, Yoyakarta, 1993, h. 3

<sup>17</sup>Kartono dan Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996,

lapangan.<sup>18</sup> Yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan apa adanya. Dalam hal ini tentang Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo Ditinjau Dari Ekonomi Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data asli.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data pertama dilokasi penelitian atau obyek penelitian. Obyek penelitian ini adalah ketua BKKBN, Kepala Pekon dan masyarakat penerima raskin.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal ataupun eksternal.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan penelitian dan dokumen lainnya sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

---

<sup>18</sup>Husaini Usman dan Purnomo setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta 2008, h. 129

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h.110

<sup>20</sup> Sutrisno dan Hadi, *Op.Cit*, h.152

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan.<sup>21</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana Implementasi Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo menurut Ekonomi Islam.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau peranannya dengan tempat.<sup>22</sup> Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur, cara ini dipakai guna lebih mudah dalam tercapainya suatu tujuan.<sup>23</sup> Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo ditinjau dari Ekonomi Islam.

<sup>21</sup>Sutrisno dan Hadi, *Metodologi Research*, jilid dua, Andi Offset, Yogyakarta, 2004,

<sup>22</sup>S.Nusution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 98

<sup>23</sup>Suharsim Arikuno, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta Ilmu, Jakarta, 2002, h. 202

c. Kuesioner

Metode kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.<sup>24</sup> Dalam hal ini kepada masyarakat penerima raskin pada periode 2010-2014 di Kecamatan Sukoharjo.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Berdasarkan hal ini bahwa dokumentasi dalam penelitian ini adalah data penerima program raskin di Kecamatan Sukoharjo dan nama penerima program raskin di Kecamatan Sukoharjo.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati.<sup>26</sup> Dalam konteks ini peneliti meneliti implementasi program beras miskin pada masyarakat Kecamatan Sukoharjo, jadi populasinya adalah seluruh masyarakat yang menerima raskin di Kecamatan Sukoharjo. Jumlah keseluruhan masyarakat penerima RASKIN setiap tahunnya yaitu:

---

<sup>24</sup>Husaini Usman dan Purnomo, *Op.Cit*, h.140

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h.112

<sup>26</sup>Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*, LkiS, Yogyakarta, 2007, h.61

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Masyarakat Penerima RASKIN**  
**di Kecamatan Sukoharjo dari Tahun 2010-2014**

No	Tahun	RTS Penerima RASKIN (Jiwa)
1	2010	1.856
2	2011	1.957
3	2012	1.968
4	2013	2.120
5	2014	2.190
<b>Jumlah rata-rata masyarakat penerima raskin</b>		<b>2.018</b>

*Sumber : Data diolah dari kantor BKKBN Kecamatan Sukoharjo*

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>27</sup>

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>28</sup>

Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam menentukan jumlah sampel, dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

keterangan:

n= Jumlah sampel minimal

N= Jumlah populasi keseluruhan

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, h.109.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2009, h.116

e 2= presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan

pengambilan sampel (1%, 5%, atau 10%)

$$n = \frac{2}{1+2} \frac{1}{(1\%)^2} = 95,2$$

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Sampel Penelitian**

No.	Nama Pekon	RTS Penerima Raskin (Jiwa)	Jumlah RTS Penerima Raskin 2010-2014 (jiwa)
1	Sinar Baru	29	2
2	Sukoharjo I	60	3
3	Sukoharjo II	204	9
4	Sukoharjo III	101	5
5	Sukoharjo IV	102	5
6	Panggung Rejo	113	5
7	Pandansari	227	10
8	Pandansurat	201	9
9	Keputran	120	5
10	Sukoyoso	104	5
11	Siliwangi	101	5
12	Waringinsari Barat	227	10
13	Pandansari Selatan	140	8
14	Sinar Baru Timur	80	4
15	Panggung Rejo Utara	83	4
16	Sukoharjo III Barat	126	6
<b>Jumlah</b>		<b>2.018</b>	<b>95</b>

*Sumber : Data diolah dari Kantor BKKBN Kecamatan Sukoharjo*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 95 orang responden. Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposif sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan



pertimbangan tertentu.<sup>29</sup> Dengan menentukan jumlah sampel melalui pertimbangan sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Petentuan Sampel**

<b>No</b>	<b>Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)</b>	<b>Jumlah Sampel</b>
1	0–25 Orang	1 Sampel
2	26–50 Orang	2 Sampel
3	51–75 Orang	3 Sampel
4	76–100 Orang	4 Sampel
5	101–125 Orang	5 Sampel
6	126–150 Orang	6 Sampel
7	151–175 Orang	7 Sampel
8	176–200 Orang	8 Sampel
9	201–225 Orang	9 Sampel
10	226–250 Orang	10 Sampel

*Sumber: Data diolah pada tahun 2016*

Adapun yang peneliti pertimbangan dalam mengambil sampel untuk setiap Pekon diatas melalui pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin selama tahun 2010-2014
  - 2) Pekerjaan responden
  - 3) Usia responden
5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dinalisis dengan beberapa cara antara lain :

- a. Editing data yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengamat) telah pulang kembali dari lapangan, maka berkas-berkas

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h.118

catatan atau informasi yang diperoleh itu dipersiapkan dan dikelola dengan baik untuk keperluan proses selanjutnya.<sup>30</sup>

- b. Koding data yaitu apabila tahap editing telah selesai dilampaui, untuk menghasilkan data yang cukup baik dan cermat, maka kegiatan koding dapatlah segera dimulai.<sup>31</sup> Rekonstruksi data (menyusun ulang) yaitu data disusun dengan teratur, akurat, dan logis.
- c. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.<sup>32</sup>
- d. Sistemasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>33</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>34</sup> Metode kualitatif adalah

---

<sup>30</sup>Koentjara Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 270

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 270

<sup>32</sup>Moersaleh dan Musanef, *Pedoman Pembuatan Skripsi* (Jakarta:Gunung Agung, 2000), h.79

<sup>33</sup>Suharnis Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, h.129

<sup>34</sup>Masyhuri Dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, Refika Adutama, Bandung, 2008, h. 13

memberikan predikat kepada variabel yang diteliti dengan kondisi sebenarnya.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan pada masyarakat yang menerima beras miskin (raskin), terutama dalam menggambarkan bagaimana implementasi program raskin terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukoharjo serta ditinjau dari ekonomi islam. Ada beberapa sub analisis yang terbagi menjadi bagian yang lebih rinci yang meliputi “implementasi program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dimana unit analisis “implementasi program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat” meliputi sub unit analisis bagaimana pelaksanaan program raskin untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat.

---

<sup>35</sup> Sudarwan Danim, *menjadi peneliti kualitatif*, PustakaSetia, Bandung, 2002, h.41.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kesejahteraan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah rasa tentram seseorang karena terpenuhinya hajat-hajat hidup lahir dan batin, kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut kesehatan, sandang, pangan dan papan (kesejahteraan ekonomi dan sosial), sedangkan kesejahteraan batin menyangkut persepsi yang bersifat intelektual, emosional maupun spiritual seseorang. Kesejahteraan bukan alat perjuangan tapi tujuan perjuangan.<sup>1</sup>

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya yang berjudul *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, “orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Garda Maeswara, *Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono*, Penerbit Narasi :Jakarta,2009, h.246

<sup>2</sup>Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, *Penjelasan I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit dan Pelaporan (PEtunnjuk Teksis Operasional)*, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, h.5

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya.

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.

b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Menurut Jeremy Bentham, terdapat empat hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan, yaitu :<sup>3</sup>

- a. Kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan utama yang harus dicapai oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi.
- b. Diberlakukan pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan agar dapat memilih dan memilah sesuatu yang dapat meningkatkan aspek kebahagiaan dalam melakukan aktifitas ekonomi.
- c. Diberlakukan adanya rumusan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.
- d. Diperlukan peranan pemerintah dalam sebagai aparat penegak undang-undang (hukum) yang telah disusun dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

## **2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan masyarakat yang hanya diukur dengan indikator moneter menunjuk aspek ketidak sempurnaan ukuran

---

<sup>3</sup>Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2008, h.111-112

kesejahteraan masyarakat karena adanya kelemahan indikator moneter. Oleh karena itu Beckkerman membedakan indikator masyarakat dalam tiga kelompok :<sup>4</sup>

- a. Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang dipelopori Collin Clark, Gilbert dan Kravis.
- b. Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap Negara.
- c. Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah keadaan bermotor dan konsumsi.

Gagasan lain untuk menyempurnakan indikator kesejahteraan masyarakat terus menerus dilakukan hingga muncul gagasan menggunakan *Physical Quality Of Life Indeks* (PQLI) atau *Basic Need Approach*. PQLI merupakan upaya untuk mengukur kualitas hidup atau kesejahteraan suatu negara. Nilai tersebut menggunakan rata-rata tiga statistik yaitu tingkat melek huruf dasar, kematian bayi, dan harapan hidup pada usia satu tahun.

Dalam perkembangannya, indikator kesejahteraan masyarakat PQLI belum memuaskan karena tingkat pendapatan, kecukupan sandang, pangan dan perumahan belum dapat dijadikan indikator kesejahteraan. Untuk

---

<sup>4</sup>Rudy Badrudin, *Op.Cit*, h.148

menyempurnakan PQLI yang belum dapat dijadikan indikator masyarakat, maka *United Nation Develoment Program* (UNDP) mengenalkan formula *Human Develoment Indeks* (HDI) atau juga disebut pula *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) pada tahun 1990, IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara atau daerah merupakan daerah atau negara maju, berkembang, atau terbelakang atau juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India *Amrrtya Send an Mahbub ul Had* seorang ekonomi Pakistan dibantu oleh *Gustav Rams* dari *Yale University* dan *Lord Megnad Desai* dari *London School Of Economic*.<sup>5</sup>

Adapun indikator kesejahteraan masyarakat menurut instansi pemerintah yang menangani kemasyarakatan, anatarain sebagai berikut:

a. BAPPENAS

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h.150



bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tanggadengan status kesejahteraan yang masih rendah.<sup>6</sup>

b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut BPS ada 14 kriteria unntuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam satu tahun, frekuensi makan setiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti kepemilikan kendaraan motor kredit atau non kredit, emas, ternak, dan sebagainya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.<sup>7</sup>

c. BKKBN

Menurut BKKBN ada beberapa indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga yang sejahtera, yaitu: anggota keluarga melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan berpergian.

---

<sup>6</sup> Jurnal perikanan dan kelautan, *analisis pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan danau bawah kecamatan dayun kabupaten Siak provinsi Riau*, h.23, diakses 20 Mei 2016

<sup>7</sup>*Ibid*, h.24

### 3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

#### a. Pengertian Kesejahteraan (Falah) Dalam Ekonomi Islam

*Al- Falah* secara bahasa bermakna *Zhafarah bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.<sup>8</sup> Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-6 :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ أَلَيْسَ لِي صَلاَتُهُمْ خَاشِعُونَ ۝ ٢ أَلَيْسَ لَهُمْ عَنِ  
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ بِالزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ ٤ أَلَيْسَ لَهُمْ  
حَافِظُونَ ۝ ٥ إِذَا كُذِّبُوا أَجَابُوا لَأُولَئِكَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ ٦

Artinya: 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, 4. dan orang-orang yang menunaikan zakat, 5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Istilah *Falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia, dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih

<sup>8</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Op.Cit.* h.2

ditekankan pada aspek spiritual.<sup>9</sup> Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 :<sup>10</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Qs : Al-Imran ayat 104)*

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, istilah *al-falah* berarti kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. dilihat dari aspek sisi dan dimensi (komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka falah bisa diartikan sebagai kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan didunia dan akhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan mencakup dua pengertian:<sup>12</sup>

<sup>9</sup> *Ibid*, h.5

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, QS. Al-Imran ayat 104.

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, *Al-Falah As Sunnah*, <http://www.qaradaghi.com>, diakses 22 Mei 2016.

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Op.Cit*, h.4

- 1) Kesejahteraan *holistic* dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat, jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan diakhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, maka kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.<sup>13</sup>

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.5

masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam,<sup>14</sup> terdapat dalam Al-Quran Surat Tha ha ayat 117-119:

فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَوَلِيُّوْجَكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿١١٧﴾  
لَكَ اَنْ تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَاَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيْهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya :117. Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (titis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. 119. dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (Qs : Tha Ha 117-119)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis, normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>15</sup>

Pertama, dilihat dari pengertiannya sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat, terlepas dari berbagai macam gangguan

<sup>14</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 2000, h.127

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h.255

kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman. Pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi kerosulan nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs : Al-Anabiya ayat 107)*

Kedua, dilihat dari segi kandungannya terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan sesama manusia (*Habl min Allah wa habl min an-nas*)

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam AS. Kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Quran tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Keempat, didalam ajaran Islam terdapat pranata dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan penciptaan kesejahteraan sosial, seperti kafaf dan sebagainya. Semua bentuk lembaga sosial mencari

alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun lembaga ini belum merata dilakukan oleh umat islam dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kelima, ajaran islam mengenai perlunya perwujudan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberi motivasi sebagaimana tersebut diatas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana mewujudkannya. Ajaran islam mewujudkan dan menumbuh subur aspek-aspek kaidah dan etika pada diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.

Idealisasi “kesejahteraan hidup” dalam islam khususnya, dan agama samawi pada umumnya, adalah “kehidupan surgawi” yaitu kehidupan di surga nanti yang selalu digambarkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi.
- b) Kecukupan sandang yang bagus-bagus.
- c) Tempat tinggal yang indah dan nyaman.
- d) Lingkungan hidup yang sehat dan segar.
- e) Hubungan sosial yang aman, tentram dan damai.
- f) Hubungan yang selalu dekat dengan Allah, Tuhan Maha Pemurah.

Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal itu harus melalui proses yang panjang, yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, h.6

<sup>17</sup> *Ibid*, h.7

- a) Keimanan yang mantap kepada Allah dan Rosulnya, dan rukun iman lainnya. Kewajiban beriman kepada Allah itu bertujuan untuk menjadi pemegang dalam kehidupan dan dapat mengikat perasaan. Dengan demikian manusia tidak akan menyeleweng ataupun keluar dari jalan yang benar dalam perjalanan bersama yang lain.
- b) Ketekunan melakukan amal-amal shaleh baik amalan yang bersifat ritual seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain, dan amalan yang bersifat sosial seperti, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas seperti pendayagunaan dan pelestarian budaya alam, penanggulangan bencana, penelitian dan sebagainya.
- c) Kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan.

Gambaran kesejahteraan “kehidupan surgawi” diidentifikasi sebagai kebahagiaan akhirat. Tetapi disamping kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut. Islam juga memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi dengan kunci keberhasilan yang tidak berbeda dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi. Orang yang mempeerlihatkan ajaran-ajaran islam dengan cermat, akan selalu mengacu pada perwujudan kemaslahatan manusia, pencapaian-pencapaian maupun kesejahteraan *ukhrawi*.



## b. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (falah) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.<sup>18</sup>

Berikut ini ayat yang menerangkan hubungan manusia dan sosial kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman dan arogansi, yaitu pada QS. An-Nahl (16) ayat 90 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
الْمُنْكَرِ الْغَنِيِّ يَعِظُكَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>19</sup>

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam Islam adalah wajib dalam

<sup>18</sup>Moh. Thahah Hasan, *Islami dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta, Lantabora Press, 2005. h.161

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h.289

jama'ah, sedemikian pula pergi ziarah haji ke Mekkah wajib bagi yang mampu. Orang Islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan berdagang setelah shalat.<sup>20</sup> Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka.<sup>21</sup>

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:<sup>22</sup>

- 1) *Keadilan*, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- 2) *Pertanggungjawaban*, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- 3) *Tafakul* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 162

<sup>21</sup> M. Umer Chapra, *Op.Cit*, h.8

<sup>22</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, terjemah, soeroyo, Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 2000, h.52

masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Kepatuhan ini membantu manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.<sup>23</sup>

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi dinilai juga dari ukuran non-material seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial.<sup>24</sup>

Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* meliputi: kebutuhan pokok (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniyyat*).<sup>25</sup>

#### a) Prioritas utama

“*Ad-Dharuriyyat*” ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. *Dharuriyyat* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.54

<sup>24</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h.63

<sup>25</sup> *Ibid*, h.64

kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yakni mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *dharuriyyat* diabaikan, maka tidak ada nada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

b) Prioritas kedua

“*Al-Hajiyat*” ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan inipun masih berkaitan dengan lima tujuan syari’at. Syari’ah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara’ dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

c) Prioritas ketiga

“*Tahsiniyat*” atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan

syariat. Syari'ah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa provinsi dalam syariah yang dimaksud untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari dharuriyah dan hajiyah.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*), dan pelengkap (*the luxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, tujuan dari system ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, yang menurut *Asy-Syatibi* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindungnya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-agl*), Keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*).<sup>27</sup> Imam Ghazali berpendapat bahwa yang jelas masuk dalam kategori *ad-dharuriyat* yang menjadi prioritas garapan Islam yang menjaga kemaslahatan :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ilyas Alimudin, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, <http://makasar.tribunnews.com>, diakses tanggal 22 Mei 2016.

<sup>27</sup> Adiwarman A. Karim, *ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.62

<sup>28</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Op.Cit.* h.89

- 1) Agama atau keimanan (*Ad-din*) merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dari peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
- 2) Jiwa (*An-nafs*) seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan sebagainya.
- 3) Akal (*Al-aql*) kemampuan daya piker, memahami dan menganalisis.
- 4) Keturunan (*An-nasl*) kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan, atau pengambilan anak angkat.
- 5) Kekayaan (*Al-mal*) merupakan sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan kebiasaan.

Tujuan *syari'ah* akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan, terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikancara pandang terhadap dunia yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya; prilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas, kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.

Jiwa, akal dan keturunan ditempatkan pada urutan selanjutnya karena ia berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang mencakup kebutuhann fisik, moral dan psikologi (mental). Memelihara jiwa sebagai

tujuan *syari'ah*, dalam sudut pandang ekonomi mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya. Dilakukan dengan menciptakan sumberdaya manusia yang berjiwa tangguh, dan mempunyai visi jauh kedepan, bukan hanya untuk mencari keuntungan saat ini, namun juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap akal diharapkan akan terciptakan kondisi mental dan materi yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan intelektual, pendidikan dan teknologi. Kemajuan yang mampu dicapai pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menjaga keturunan merupakan hal utama setelah jiwa dan akal. Keberlangsungan hidup keturunan sebagai penerus generasi merupakan asset SDM untuk masa yang akan datang. Pengelolaan SDM yang baik, akan menjadikan manusia mampu menciptakan hal-hal yang inovatif dan kreatif, sehingga mampu memberikan dampak positif yang luas dimasyarakat. Perlindungan terhadap kekayaan pada urutan terakhir dari tujuan *syari'ah*, ini lebih dikarenakan kekayaan bukan merupakan unsur utama dalam mewujudkan kesejahteraan semua manusia secara adil.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h.92

### c. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam

Indikator kesejahteraan menurut Islam meununjuk kepada Al-Qur'an surat Al-Quraysh ayat 3-4 :

فَلْيَعْبُدُوهُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ آلَئِيْ أَطْعَمْتُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَاءِ أَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝۴

Artinya : 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), 4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Qs: Al-Quraysh 3-4)

Bedasarkan indikator tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>30</sup>

#### 1) Menyembah tuhan (pemilik)

Indikator sejahtera yang pertam dan paling utama didalam Al-Quran adalah “menyembbah tuhan (pemilik) rumah (ka'bah), mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang Khalik. Semua aktivitas ibadah.

---

<sup>30</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhlui Atas Berbagai Persoalan Umat*, edisi 2, h.126-127



## 2) Menghilangkan lapar

Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah Swt, jadi ditegaskan bahwa rizki dari Allah.

## 3) Menghilangkan rasa takut

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika masih banyak tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan dan kriminal lainnya, maka dapat di indikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan menjaga kesholehan merupakan bagian integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Komitmen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan dan keadilan menurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai titipan sacral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengakulasikan “*maqashid syariah*”, diantaranya adalah : <sup>31</sup>

- 1) Pemenuh kebutuhan pokok
- 2) Sumberdaya pendapatan yang terhormat
- 3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

---

<sup>31</sup>Adiwarman, *Op.Cit*, h.164

## **B. Program Pengentasan Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.<sup>32</sup>

Menurut Nugroho kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Menurut Suryawati, berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak

---

<sup>32</sup> Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, *Memperdayakan kaum Miskin*, Yogyakarta;2005, h.75

terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- a. Kemiskinan (*proper*)
- b. Ketidakberdayaan (*power less*)
- c. Karentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

d. Ketergantungan (*dependence*)

e. Keterasingan (*isolation*)

## 2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah :<sup>33</sup>

### a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h.166

untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan criteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.<sup>34</sup>

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.167

#### d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terka dang memiliki unsur diskriminatif.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan. Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah :<sup>35</sup>

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatankerja, dan ketrampilan yang memadai.
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- c. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.168

- d. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*)
- e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan diatas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.<sup>36</sup>

Indikator-indikator mengenai kemiskinan pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h.170

menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

#### a. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan perkapita (*income per capita*) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun.

Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h.172



pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.

b. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat disuatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.<sup>38</sup>

### 3. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia

Pada tahun 1998 terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang memberikan hantaman besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta

---

<sup>38</sup> <http://bps.go.id/dalam-angka/> diakses tanggal 25 mei 2016

atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun.<sup>39</sup>

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan

---

<sup>39</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/program-penghentas-kemiskinan-indonesia/diakses> tahun 2016

kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Menyempurnakan program perlindungan sosial
- b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- c. Pemberdayaan masyarakat, dan
- d. Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing :<sup>40</sup>

1) Kluster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk

---

<sup>40</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id/program-penghentas-kemiskinan-indonesia/diakses> 15 mei 2016

memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.<sup>41</sup>

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Jenis program kluster I yaitu : Jaminan

---

<sup>41</sup> *Ibid, page 2*

Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan (merah Keluarga Sejahtera), Raskin (beras untuk keluarga miskin), dan Program Indonesia Pintar.

## 2) Kluster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga

mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.<sup>42</sup>

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

1) Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

2) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga

---

<sup>42</sup> *Ibid, page 3*

<sup>43</sup> *Ibid, page 5*

memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

- 3) Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

- 4) Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:<sup>44</sup>

a) Wilayah

Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.

b) Sektor

Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. Jenis program kluster II yaitu PNPM Mandiri.

c. Kluster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan

---

<sup>44</sup> *Ibid, page 7*



akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:<sup>45</sup>

- 1) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro  
Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.
- 2) Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar  
Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

---

<sup>45</sup> Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, *Op.Cit*, h.45

- 3) Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha
- Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jenis program kluster III yaitu kredit usaha rakyat (KUR).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.46

### **C. Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)**

#### **1. Pengertian Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)**

Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras dipasaran. Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin (RTM).<sup>47</sup>

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan

---

<sup>47</sup> <http://bulog.go.id/>, "Program Beras untuk Keluarga Miskin", h.4-6, diakses 17 mei 2016

keluargamelalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.<sup>48</sup>

Program raskin adalah program nasional lintas sektoral yang baik vertical (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (Lintas Kemmenterian/Lembaga), sehingga semua pihak yang berkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program raskin.<sup>49</sup>

## **2. Tujuan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)**

Untuk terlaksana program raskin dengan baik, adapun tujuan dari program tersebut, yaitu:

- a. Tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, melalui pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
- b. Sasaran rumah tangga miskin (RTM), di desa atau kelurahan yang berhak menerima beras raskin, sebagai hasil seleksi musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar, dalam daftar penerimaan manfaat (DPM),di tetapkan oleh kepala desa atau kelurahan dan di sahkan oleh camat.
- c. Kriteria raskin hanya di berikan kepada rumah tangga miskin, penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar

---

<sup>48</sup> <http://www.tnp2k.go.id/id>, “*Beras Raskin*”,h.1, diakses 17 mei 2016

<sup>49</sup> <http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab-program-raskin/page1>, diakses 24 mei 2016

dalam daftar penerima manfaat (DPM-I) dan diberi identitas (kartu raskin dan bentuk lain).

- d. Bentuk program pembagian beras, kepada kepala rumah tangga miskin hasil musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar dalam penerimaan manfaat (DPM-I)

### **3. Sasaran Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)**

Sasaran program raskin tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kilogram per satu rumah tangga miskin per bulan.<sup>50</sup>

Indikator keberhasilan program raskin:

- a. Tepat sasaran penerima manfaat , raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-I), dan di beri identitas (kartu raskin atau bentuk lain)
- b. Tepat jumlah jumlah beras, raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 sampai dengan 15 Kilogram RTM, perbulan sesuai dengan hasil musyawarah.
- c. Tepat harga, harga beras raskin adalah sebesar Rp. 1.000 per Kilogram netto di titik distribusi.

---

<sup>50</sup> <http://www.tnp2k.go.id> ,*Op.Cit*, Page 2

- d. Tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

#### **4. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin**

Dalam menentukan daftar masyarakat penerima raskin didasarkan pada data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adapun kriteria masyarakat penerima raskin adalah:<sup>51</sup>

- a. Rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp.500.000
- b. Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal RP.1.500.000
- c. Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap
- d. Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian
- e. Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok ( masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang)
- f. Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali dalam seminggu
- g. Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak/numpang

---

<sup>51</sup> <http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab-program-raskin/page 2>, diakses 28 oktober 2016

- h. Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar
- i. Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus dsb
- j. Sumber air sumur masih menimba atau manual
- k. Sumber penerangan tidak menggunakan listrik/ menggunakan listrik akan tapi masih menumpang.

## **5. Pengelolaan dan Pengorganisasian**

### **a. Prinsip pengelolaan**

Prinsip pengelolaan raskin yaitu , nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Keberpihakan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), raskin bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- 2) Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan raskin terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.

---

<sup>52</sup> *Ibid, page 6*

- 3) Partisipasif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program raskin mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- 4) Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

b. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan program raskin tahun 2010-2014 perlu dibagi pembagian tugasnya agar dicapai hasil yang efektif, maka dibentuklah koordinasi raskin di pusat, di provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di desa atau kelurahan atau pemerintahan setingkat.<sup>53</sup>

Tim koordinasi raskin pusat beranggotakan unsur dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Kementerian Negara BUMN,

---

<sup>53</sup> *Ibid, page 6-7*



Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP), dan Perum BULOG.

c. Kedudukan

Tim koordinasi raskin pusat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

d. Tugas

Melaksanakan koordinasi kebijakan perencanaan dan anggaran pelaksanaan dan distribusi fasilitasi monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program raskin.

e. Fungsi

Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan raskin, sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

f. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari pengarah, pelaksana dan sekretariat. Pengarah terdiri dari ketua dan unsur Kementerian

### **BAB III**

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo**

Kecamatan Sukoharjo adalah merupakan salah satu kecamatan dari kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dengan luas wilayah seluruhnya 6.737 Km<sup>2</sup> dari 16 Pekon dengan jumlah penduduk yaitu 46.372 jiwa yang terdiri dari 12.044 KK, laki-laki 23.172 jiwa dan perempuan berjumlah 23.200 jiwa. Penduduk kecamatan Sukoharjo pada umumnya bekerja atau bermata pencaharian dan disektor pertanian/perladangan. Batas wilayah Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banyumas
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gading Rejo
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu dan Pagelaran

---

<sup>1</sup> Erli S.E, ” Dokumen profil kecamatan Sukoharjo

**a. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan**

Kecamatan Sukoharjo terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Jawa, Sunda, Lampung, Batak, Padang, dan masih ada yang lainnya. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak di bidang pertanian terdiri dari sawah dan petani lading, disamping pertanian atau bercocok tanam sangat potensial juga di bidang peternakan, perdagangan dan industri kecil atau industri rumah tangga. Tentang sumber daya manusia di Kecamatan Sukoharjo ini pada umumnya masyarakat telah maju di bidang pendidikan.

**b. Arah Kebijakan Pengembangan**

Dalam rangka untuk mencapai keseimbangan pembangunan daerah yang serasi yang berkelanjutan dengan proses pemberdayaan masyarakat pedesaan dan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang program pengentasan kemiskinan melalui program penyediaan prasarana dan sarana pembangunan perekonomian rakyat ini akan memberikan suatu kerangka upaya pemanfaatan potensi wilayah kecamatan yang menekankan kepada sinergi tiga hal pokok yaitu integritas kebijaksanaan pengembangan wilayah, sinkronasi kegiatan pembangunan sektor, dan akomodasi atas potensi dan kebutuhan masyarakat.

### **c. Potensi Perkembangan**

#### **1) Kondisi Fisik Wilayah dan Sumber Daya Alam**

Kecamatan Sukoharjo terletak pada daerah yang sangat strategis yaitu terletak diantara kecamatan-kecamatan yang telah maju/berkembang dengan baik seperti Kecamatan Pringsewu dan berbatasan pula dengan Lampung Tengah. Kecamatan Sukoharjo berada pada daerah perladangan yang dapat diandalkan sumber daya alamnya. Penggunaan lahan di Kecamatan ini pada umumnya berupa lading tegalan (38,90%), perkebunan (14,10%), pertanian sawah (10,25%) dan lainnya seperti pemukiman, pembangunan umum, dan lain-lain (36,24%). Kondisi fisik yang demikian sangat berpotensi untuk mendukung program sektoral kecamatan terutama pada sektor perladangan dan pertanian.<sup>2</sup>

#### **2) Kondisi Kependudukan**

Penduduk Kecamatan Sukoharjo pada umumnya bekerja pada sektor perladangan atau pertanian, hal ini dapat dilihat dari presentasi rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian atau perladangan (79,06%) sedangkan pada sektor industri (2,82%) dan lain-lain (18,12%). Potensi kependudukan pada Kecamatan Sukoharjo ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam rangka mendukung sektor

---

<sup>2</sup>*Ibid*

perladangan dan pertanian. Sedangkan untuk sektor lain seperti industri dan lain-lainnya dapat dijadikan sebagai sektor yang sangat menunjang perkembangan kecamatan dimasa mendatang.

### 3) Kondisi Kegiatan Usaha

Kegiatan sektor pada Kecamatan Sukoharjo sesuai dengan arahan program kecamatan yakni sektor pertanian dan perladangan masih mendominasi kegiatan sektor usaha dan merupakan salah satu kecamatan andalan Kabupaten Pringsewu. Masyarakat desa, kelompok-kelompok tani yang selalu mengadakan diskusi kelompok, peran koperasi yang amat besar bagi kegiatan perekonomian masyarakat akan dan di dukukung oleh sumber daya aparat kecamatan yang cukup baik.

## 2. Kondisi Masyarakat Kecamatan Skoharjo

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dalam bidang usaha. Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran ketetapan masyarakat dimana sapat dikatakan masyarakat tersebut sejahterah atau tidak. Berikut ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat pada warga kecamatan Sukoharjo, yaitu:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

1) Pengeluaran Konsumsi

Tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat dapat dilihat berdasarkan pengeluaran untuk biaya pangan/makanan dan non pangan dapat juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran rumah tangga masyarakat Kecamatan Sukoharjo dapat digambarkan indikator kesejahteraan masyarakat dengan merata-ratakan minimal pengeluaran masyarakat Sukoharjo perbulannya. Berikut ini adalah tabel besaran minimal pengeluaran konsumsi rumah tangga:<sup>3</sup>

**Tabel 3.1**  
**Pola Konsumsi Masyarakat Kecamatan Sukoharjo**

No	Pola Konsumsi	Jumlah Pengeluaran (perbulan)
1	Kebutuhan Pangan/Makan	Rp.700.000
2	Kebutuhan Pakaian/Sandang	Rp.300.000
3	Biaya Pendidikan	Rp.500.000
4	Biaya Kesehatan	Rp.250.000
5	Pengeluaran lain (Listrik, Air)	Rp.200.000

*Sumber: Hasil Wawancara Staf Kantor Kecamatan Sukoharjo*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran atau pola konsumsi rumah tangga terbesar adalah pengeluaran untuk makan/pangan. Pengeluaran untuk pangan ini lebih besar

---

<sup>3</sup> Erli, S.E, wawancara pada tanggal 15 Agustus 2016

dibandingkan pola konsumsi lain seperti: kebutuhan Sandang, biaya Pendidikan, Kesehatan dan pengeluaran lainnya.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengeluaran/konsumsi terbesar yang dikeluarkan dari hasil pendapatan lebih besar untuk konsumsi pangan. Sisa pendapatan digunakan untuk pengeluaran lain seperti biaya listrik/air, biaya pendidikan anak, kesehatan dan pengeluaran lainnya.

## 2) Tingkat Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan pokok rumah tangga yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau tingkat kesejahteraan suatu keluarga disamping kebutuhan pangan dan sandang. Keadaan atau kondisi tempat tinggal (rumah) dapat menggambarkan keberhasilan dalam kelayakan tempat tinggal. Dari hasil wawancara yang didapat masyarakat Sukoharjo rata-rata banyak yang memiliki rumah/tempat tinggal yang layak untuk dihuni dan rumah mereka adalah rumah permanen milik mereka walaupun ada yang belum memiliki Sertifikat Hak milik, ada juga beberapa masyarakat yang masih mengontrak, tapi hanya beberapa rumah tangga pendatang.

### 3) Tingkat Kesehatan

Kesehatan memberikan peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata.

Untuk kesehatan di Kecamatan Sukoharjo terdapat Prasarana kesehatan yang ada, yaitu terdiri dari Rumah Sakit Rawat Inap, Puskesmas, Praktek Dokter, Posyandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Prasarana Kesehatan di Kecamatan Sukoharjo**

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah Prasarana
1	Rumah Sakit Rawat Inap	1
2	Puskesmas Rawat Inap	1
3	Puskesmas Pembantu	5
4	Posyandu	47
5	Praktek Dokter	10

*Sumber: Staf Kantor Kecamatan Sukoharjo tahun 2015*

Dari tabel diatas menunjukan bahwa prasarana kesehatan yang paling banyak di Kecamatan Sukoharjo adalah Posyandu dan



praktek dokter sebanyak 47 tempat dan 10 tempat. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sukoharjo diperoleh informasi bahwa untuk memperoleh pelayanan kesehatan biasanya diperoleh di Puskesmas dan rumah sakit di Sukoharjo.

#### 4) Tingkat Perlindungan

Menurut hasil wawancara dengan pihak Kecamatan dalam hal perlindungan, bahwa masyarakat Sukoharjo telah mendapat perlindungan secara baik. Dengan terbuktinya masyarakat diberikan kemudahan dalam urusan surat menyurat seperti pembuatan E-KTP atau sering disebut dengan Elektronik-KTP dimana masyarakat diberikan biaya gratis dalam pengurusan KTP seumur hidup mereka sehingga tidak perlu mengurus perpanjangan KTP lagi seperti beberapa tahun kebelakang yang masih menyulitkan dalam proses administrasinya. Selain E-KTP juga masyarakat diberikan kemudahan dalam kepengurusan Kartu Keluarga dimana masyarakat lebih dimudahkan dalam kepengurusan anaknya ketika ingin masuk ke jenjang pendidikan atau kegiatan yang harus melibatkan Kartu Keluarga.

b. Tingkat Kehidupan

1) Tingkat Pendapatan

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu kelompok masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan masyarakat yang makin meningkat berarti juga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Selain indikator pengeluaran per kapita sebulan, besarnya konsumsi sehari dan tingkat pendapatan yang dimiliki dapat menunjukkan seberapa jauh taraf kesejahteraan yang telah dicapai. Berikut ini adalah tabel besaran pendapatan warga Kecamatan Sukoharjo berdasarkan mata pencaharian:

**Tabel 3.3**  
**Pendapatan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penghasilan
1	Pedagang	Rp.500.000 – Rp.1.500.000
2	Petani	Rp.500.000 – Rp.2.000.000
3	TNI/POLRI	Rp.2.500.000 – Rp.5.000.000
4	PNS	Rp.1.500.000 – Rp.4.500.000

*Sumber: Data diolah dari Kantor Kecamatan Sukoharjo tahun 2016*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa besaran pendapatan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo bervariasi, dari yang terendah sampai tertinggi. Dapat dikatakan bahwa beberapa masyarakat Kecamatan Sukoharjo berpenghasilan diatas batas

minimum nilai kesejahteraan dan terdapat juga masyarakat yang berpenghasilan dibawah batas minimum nilai kesejahteraan.

## 2) Pendidikan

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar penduduk suatu daerah dibidang pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumberdaya manusianya. Tingkat pendidikan di Sukoharjo berpengaruh dengan adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Berikut ini adalah prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sukoharjo, yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Sarana Pendidikan di Sukoharjo**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sarana
1	TK/PAUD	16
2	SD	37
3	SMP/MTS	6
4	SMA/SMK	4

*Sumber: Data diolah dari Kecamatan Sukoharjo tahun 2016*

Dalam hal ini terlihat bahwa prasarana penunjang pendidikan di Kecamatan Sukoharjo sangat baik untuk menunjang pendidikan masyarakat sampai ke jenjang SMA.

### **3. Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo**

#### **a. Sejarah Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo**

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural, atau struktural. Berikut ini adalah jumlah tingkat penduduk miskin Kabupaten Pringsewu dari tahun 2010-2014, yaitu:

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pringsewu**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>
1	2010	67,40
2	2011	67,50
3	2012	67,60
4	2013	67,69
5	2014	68,01

*Sumber: Data primer diolah tahun 2016*

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu meningkat dari tahun 2010 sebesar 67,40 dan di tahun 2014 mengalami peningkatan yakni sebesar 68,01. Oleh sebab itu, keefektifan suatu program ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. Hal ini memberikan bukti bahwa segala bentuk program pemerintah belum berjalan secara maksimal termasuk program beras untuk masyarakat miskin (raskin).

Program beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo berlangsung sejak tahun 2002. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM).

Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat miskin sebanyak 15 kg/KK/bulan. Beras diberikan tidak dengan cuma-cuma. Penerima bantuan Raskin harus membayar dengan harga Rp.1.600 per kg netto di titik Distribusi. Sehingga selisih antara harga pasar yang seharusnya dibayar dengan harga yang sesungguhnya dibayar ( Rp.1.600,/kg ) oleh keluarga miskin menjadi besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah per kilogramnya. Berikut ini adalah

jumlah penerima manfaat beras untuk rumah tangga miskin (raskin) masyarakat Kecamatan Sukoharjo, yaitu:

**Tabel 3.6**  
**Jumlah RTS Penerima Manfaat Beras RASKIN**  
**Tahun 2010-2014**

No	TAHUN	Jumlah RTS Penerima Manfaat RASKIN (Rumah Tangga)
1	2010	1.856
2	2011	1.957
3	2012	1.968
4	2013	2.120
5	2014	2.190
<b>Jumlah rata-rata Masyarakat menerima Raskin</b>		<b>2.018</b>

*Sumber: Data diolah dari kantor BKKBN Kecamatan Sukoharjo*

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah RTS penerima manfaat beras untuk masyarakat miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2010 sebesar 1.856 RTS dan ditahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.190 RTS. Oleh sebab, keefektivan suatu program ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian.

- b. Implementasi Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo

Program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin) di Kecamatan Sukoharjo sudah berlangsung sejak tahun 2002, dimana program raskin merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi

masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Menurut ketua BKKBN, bahwa seluruh pekon yang ada di Kecamatan Sukoharjo ini telah menerima bantuan program raskin. Namun dalam pendistribusiannya tidak dilakukan setiap bulan, pendistribusian raskin ke titik distribusi hanya dilakukan ketika masyarakat benar-benar dalam masa kesulitan pangan (peceklik) atau sedang mengalami gagal panen. Hal ini menyebabkan ketidak pastian kapan dan berapa kali dalam setahun raskin diberikan kepada masyarakat. Proses pendistribusian raskin hanya dilakukan sampai titik kelurahan/ pekon saja yang menerima bantuan, dan untuk proses penyerahan raskin sampai kepada RTS-PM dilakukan oleh pihak pelaksana di kelurahan.

Raskin di Kecamatan Sukoharjo ini belum bisa dikatakan efektif, Karena masih banyak masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkan bantuan raskin, juga sebaliknya masyarakat yang sudah dikatakan mampu masih menerima bantuan raskin, dan di Kecamatan Sokoharjo banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran akan pentingnya raskin bagi masyarakat miskin. Adanya kurang ketepatan pemberian raskin karena masih banyak masyarakat yang menuntut apabila tidak diberikan tidak ikut serta dalam pembangunan desa, dan juga berdasarkan hasil observasi langsung masih adanya pilih kasih yang diberikan di sebagian pekon di kecamatan Sukoharjo sehingga

kepala pekon lebih mengedepankan keluarganya dahulu yang menerima bantuan raskin dibandingkan dengan warga lain meskipun sudah dinyatakan keluarga mampu. Dan juga dapat dilihat dari kualitas beras raskin itu sendiri masih banyak yang belum bisa dikatakan layak konsumsi bukan berarti tidak dapat dikonsumsi. Karena beras raskin sebelum diberikan kepada masyarakat selalu di semprot pestisida agar tidak terjadi kerusakan pada kondisi beras itu sendiri namun berdampak pada rasa atau aroma yang ditimbulkan ketika dimasak, sehingga beras raskin ini hanya dimasak sebagai campuran dan masyarakat juga ,masih mengeluarkan biaya untuk membeli beras yang layak sebagai campuran raskin. Sedangkan raskin itu sendiri bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran keluarga.

- c. Mekanisme Penetapan Daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) program Beras untuk Masyarakat Miskin (raskin)
  - 1) Penetapan RTS-PM Program Raskin, didasarkan pada Basis Data Terpadu untuk program perlindungan Sosial.
  - 2) Basis data terpadu berisikan sekitar 25 juta rumah tangga dengan kondisi terendah dirinci menurut nama dan alamat. Sumber utama Basis Data Terpadu adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan



diserahterimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

- 3) Semua rumah tangga yang masuk dalam Basis Data Terpadu diperingkatkan berdasarkan status kesejahteraannya dengan menggunakan metode indeks kesejaterana yang obyektif dan spesifik untuk setiap kabupaten/kota.
- 4) Sesuai dengan pagu nasional Raskin yang telah ditetapkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013, TNP2K mengidentifikasi masing-masing sekitar 17,5 juta dan 15,5 juta rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dan Basis Data Terpadu. Dengan demikian mereka yang didata pada PPLS 2011 tidak serta merta menjadi RTS-PM.
- 5) Pagu Raskin per provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada sebaran jumlah RTS-PM yang termasuk dalam 17,5 juta (2012) dan 15,5 juta (2013) rumah tangga yang paling rendah tingkat kesejahteraannya dari Basis Data Terpadu sebagaimana dijelaskan diatas.
- 6) TNP2K menyerahkan data pagu daerah beserta nama dan alamat RTS-PM raskin Kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- 7) Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan sosial dan Perumahan Rakyat selaku ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat menetapkan pagu raskin provinsi dan jumlah RTS Kabupaten/kota berdasarkan data dari TNP2K.

d. Mekanisme Penyaluran Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Adapun alur dalam penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) adalah sebagai berikut:

- 1) Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA)
- 2) Beras raskin disalurkan oleh perum Bulog ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum Bulog dan pemerintah kabupaten/kota
- 3) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras raskin kepada para RTS-PM dan masyarakat umum dapat mengetahui rumah tangga mana saja di desa/kelurahan tersebut yang berhak menerima raskin.

**4. Karakteristik Responden**

Pada bagian ini karakteristik responden yang akan dibahas yaitu dimulai dari usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan utama, jumlah anggota keluarga. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Sukoharjo dengan jumlah responden sebanyak 95 orang.

a. Usia Reponden

**Tabel 3.7**  
**Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	<20 Tahun	-	-
2	21-30 Tahun	10	10,5%
3	31-40 Tahun	48	50,5%
4	> 41 Tahun	37	39%
<b>Jumlah</b>		95	100 %

*Sumber: Data Primer diolah tahun 2016*

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 20 tahun tidak ada, kemudian responden yang berusia antara 21-30 tahun berjumlah 10 orang atau 10,5%, sedangkan responden yang berusia diantara 31-40 tahun berjumlah 48 orang atau sebesar 50,5%, dan responden yang berusia anantara lebih dari 41 tahun berjumlah 37 orang atau sebesar 39%.

b. Berdasarkan Pekerjaan Responden

**Tabel 3.8**  
**Pekerjaan Responden**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Ibu Rumah Tangga	10	10,5%
2	Petani	42	44,2%
3	Buruh	28	29,4%
5	Pedagang	15	15,7%
<b>Jumlah</b>		95	100%

*Sumber: Data Primer diolah tahun 2016*

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebesar 10 orang atau 10,5%, sedangkan untuk jumlah responden yang bekerja sebagai

petani adalah 42 orang atau 44,2%, sedangkan pada jumlah pekerjaan responden buruh sebesar 28 orang atau 29,4%, jumlah responden yang bekerja menjadi pedagang sebesar 15 orang atau sebesar 15,7%.

##### **5. Hasil Jawaban Kuisisioner (Angket) Implementasi Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo**

Untuk memperoleh data tentang implementasi program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukoharjo diperoleh melalui penyebaran angket sebanyak 20 butir soal pertanyaan untuk 95 sampel. Berdasarkansebaran angket dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil Jawaban Kuisisioner (Angket) Program raskin di Kecamatan Sukoharjo

**Tabel 3.9**  
**Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang disubsidikan oleh pemerintah bermanfaat bagi keluarga anda ?	85	10
<b>Persentase %</b>	<b>89,5%</b>	<b>10,5%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, angket warga mengenai Apakah beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang disubsidikan oleh pemerintah bermanfaat bagi keluarga anda, yang

menjawab iya berjumlah 85 orang atau 89,5% dan yang menjawab tidak adalah berjumlah 10 orang atau sebesar 10,5%. Hal ini menunjukkan bahwa program raskin di Kecamatan Sukoharjo sebagian besar masyarakat menjawab bermanfaat. Jadi program raskin masih dibutuhkan oleh RTS di Kecamatan Sukoharjo.

**Tabel 3.10**  
**Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah beras untuk masyarakat miskin (raskin) dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga anda? Terutama pada beban pangan pokok.	85	10
<b>Persentase %</b>	<b>89,5%</b>	<b>10,5%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menjawab iya berjumlah 85 orang atau sebesar 89,5% dan yang menjawab tidak berjumlah 10 orang atau sebesar 10,5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 85 orang yang menjawab bahwa program ini dapat mengurangi beban pangan keluarganya.

**Tabel 3.11**  
**Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang disubsidikan pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga anda ?	40	55
<b>Persentase %</b>	<b>42,1%</b>	<b>57,9%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa beras raskin belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka, berdasarkan data diatas bahwa masyarakat yang menjawab iya adalah 40 orang atau sebesar 42,1% dan yang mengatakan tidak adalah 55 orang atau sebesar 57,9%. Hal ini menunjukan 55 orang RTS-PM merasa tidak cukup atau kurang terhadap beras yang disubsidikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

**Tabel 3.12**  
**Ketepatan Harga Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah anda membeli beras raskin dengan harga Rp. 1.600/KG setiap bulannya ?	70	25
<b>Persentase %</b>	<b>79%</b>	<b>20%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Dari tabel diatas terdapat 70 orang atau sebesar 79% menjawab bahwa mereka membeli beras raskin dengan harga Rp. 1.600/KG setiap bulannya . serta masyarakat yang menjawab tidak adalah sebanyak 20 orang atau sebesar 20%.

**Tabel 3.13**  
**Ketepatan Kualitas Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah menurut Bapak/Ibu kualitas beras Raskin layak untuk dikonsumsi ?	25	70
<b>Persentase %</b>	<b>26,3%</b>	<b>73,7%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner 2016*

Dari tabel diatas rumah tangga penerima manfaat beras raskin yang menjawab iya terdapat 35 orang atau sebesar 36,8% dan yang menjawab tidak berjumlah 65 orang atau sebesar 63,2%. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat 63,2% masyarakat mengatakan beras raskin tidak layak konsumsi.

**Tabel 3.14**  
**Ketepatan Sasaran Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah pendapatan keluarga anda minimum Rp.500.000 per bulannya?	83	12
<b>Persentase %</b>	<b>88,7%</b>	<b>12,6%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Rumah Tangga Sasaran yang menjawab iya sebesar 83 orang atau 88,7% dan yang menjawab tidak adalah sebesar 12 orang atau 12,6%. Sehingga dapat dilihat bahwa pendapatan RTS per bulannya sebagian besar memenuhi batas minimum Rp.500.000.

**Tabel 3.15**  
**Ketepatan Sasaran Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah Keluarga Bapak/Ibu memiliki lahan pertanian?	75	20
<b>%</b>	<b>79%</b>	<b>21%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Rumah Tangga Sasaran yang menjawab iya berjumlah 75 orang atau 79%,

dan yang menjawab tidak berjumlah 12 orang atau sebesar 12,6%. Sehingga dapat diketahui bahwa hampir seluruh Rumah Tangga penerima raskin memiliki lahan pertanian sendiri.

**Tabel 3.16**  
**Ketepatan Sasaran Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah lantai rumah anda minimal berlantaikan semen?	50	45
<b>Persentase %</b>	<b>52,6%</b>	<b>47,4%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Rumah Tangga Sasaran yang menjawab iya berjumlah 50 orang atau sebesar 52,6% dan yang menjawab tidak berjumlah 45 orang atau sebesar 47,4%. Sehingga dapat diketahui bahwa setengah persen dari rumah tangga penerima raskin memiliki status kepemilikan rumah yang layak.

**Tabel 3.17**  
**Ketepatan Jumlah Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah keluarga anda selalu menerima beras raskin sebesar 10-15kg?	95	0
<b>Persentase %</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga sasaran yang menjawab iya berjumlah 95 orang atau sebesar



100%. Bahwa dapat diketahui seluruh rumah tangga sasaran menyatakan menerima beras dengan kuantitas 10-15 KG .

**Tabel 3.18**  
**Ketepatan Administrasi Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima raskin?	40	55
<b>Persentase %</b>	<b>42%</b>	<b>68%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukan bahwa hampir setengah responden atau 42% yang menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa berdasarkan tingkat ketepatan administrasi bnyaknya rumah tangga sasaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

**Tabel 3.19**  
**Ketepatan Waktu Program Raskin**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah anda menerima raskin sesuai jadwal?	0	95
<b>Persentase %</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukan bahwa tidak ada responden yang menjawab iya dan yang menjawab tidak adalah seluruh responden atau sebesar 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa pembagian beras raskin tidak diberikan sesuai jadwal (tidak menentu).

**Tabel 3.20**  
**Tingkat Kebutuhan Dasar (makanan) Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah keluarga anda minimal makan dua kali sehari ?	95	0
<b>Persentase %</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 95 responden atau 100% responden menjawab iya dan tidak ada responden yang menjawab tidak. Dalam hal ini responden menunjukan bahwa keluarganya minimal makan dua kali sehari.

**Tabel 3.21**  
**Tingkat Kebutuhan Dasar (Makanan) Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah dalam waktu seminggu dua kali keluarga anda mengkonsumsi ikan?	80	15
<b>Persentase %</b>	<b>84,2%</b>	<b>15,8%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 80 reponden atau 84,2% responden yang menjawab iya dan 15 orang responden atau 15,8% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa 84,2% responden tercukupi kebutuhan pangannya.

**Tabel 3.22**  
**Tingkat Kebutuhan Dasar (Perumahan) Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah status kepemilikan rumah bapak/ibu milik sendiri?	90	5
<b>Persentase %</b>	<b>94,7%</b>	<b>5,3%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 90 responden atau 94,7% responden yang menjawab iya dan 5 orang responden atau 5,3% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa 94,7% responden memiliki rumah milik sendiri.

**Tabel 3.23**  
**Tingkat Kesehatan Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah jika keluarga anda sakit langsung menuju ke Puskesmas?	65	30
<b>Persentase %</b>	<b>68,4%</b>	<b>31,6%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 65 responden atau 68,4% responden yang menjawab iya dan 30 orang responden atau 31,6% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa 68,4% responden apabila sakit langsung menuju ke Puskesmas.

**Tabel 3.24**  
**Tingkat Perlindungan**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah keluarga anda diberikan kemudahan oleh pemerintah dalam hal pengurusan akta kelahiran/KTP dan sebagainya?	95	0
<b>Persentase %</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>

*Sumber: Data diolah dari kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 95 responden atau 100% responden yang menjawab iya dan 0% atau tidak ada responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga RTS dalam pengurusan akta kelahiran/KTP dan sebagainya dimudahkan oleh Pemerintah.

**Tabel 3.25**  
**Tingkat Pendapatan Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah bapak/Ibu memiliki penghasilan tetap?	25	70
<b>Persentase %</b>	<b>26,3%</b>	<b>73,7%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 25 responden atau 26,3% responden yang menjawab iya dan 70 responden atau 73,7% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 73,7% masyarakat penerima raskin tidak memiliki penghasilan tetap.

**Tabel 3.26**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah jenjang pendidikan keluarga anda minimal SMP?	70	25
<b>Persentase %</b>	<b>73,7%</b>	<b>26,3%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 70 reponden atau 73,7% responden yang menjawab iya dan 25 responden atau 26,3% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa sebesar 73,7% RTS bersekolah minimal pada jenjang SMP.

**Tabel 3.27**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah seluruh anggota keluarga anda mengenyam bangku pendidikan?	70	25
<b>Persentase %</b>	<b>73,7%</b>	<b>26,3%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 70 reponden atau 73,7% responden yang menjawab iya dan 25 responden atau 26,3% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa sebesar 73,7% RTS seluruh anggotanya mengenyam bangku pendidikan.

**Tabel 3.28**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah anggota keluarga anda pernah mengenyam pendidikan non formal misal les?	50	45
<b>Persentase %</b>	<b>53%</b>	<b>47,4%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 50 reponden atau 53% responden yang menjawab iya dan 25 responden atau 47,6% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa sebesar 50 RTS-PM anggota keluarganya pernah mengenyam pendidikan non formal.

**Tabel 3.29**  
**Skala Perekonomian Masyarakat**

<b>Pertanyaan</b>	<b>IYA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah ada pilihan bagi anda untuk pekerjaan yang lebih baik dalam menunjang perekonomian keliuarga anda?	10	85
<b>Persentase %</b>	<b>10,5%</b>	<b>89,5%</b>

*Sumber: Data diolah dari Kuisisioner tahun 2016*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data yang menunjukkan bahwa 10 reponden atau 10,5% responden yang menjawab iya dan 85 responden atau 89,5% responden yang menjawab tidak. Hal ini menunjukan bahwa sebesar 85 RTS-PM tidak memiliki pilihan pekerjaan lain yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kecamatan Sukoharjo**

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T:<sup>1</sup>

1. Tepat sasaran adalah raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan diberi identitas.
2. Tepat jumlah adalah beras raskin yang diberikan sejumlah 15 Kilogram untuk setiap Kepala Keluarga dalam perbulan.
3. Tepat harga adalah harga beras raskin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp.1.600/KG.
4. Tepat waktu adalah pembagian beras raskin dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
5. Tepat Kualitas adalah kualitas beras raskin layak untuk dikonsumsi.

---

<sup>1</sup><http://www.tnp2k.go.id/id>, “Beras Raskin” h.1, diakses 17 mei 2016

6. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Program raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.

Dari data yang berhasil dihimpun penulis diketahui bahwa seluruh Pekon yang ada di Kecamatan Sukoharjo menerima bantuan Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Berikut data penerima raskin dalam kurun waktu 5 tahun:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah RTS Penerima Manfaat Beras Raskin**  
**Tahun 2010-2014**

No	TAHUN	Jumlah RTS Penerima Manfaat RASKIN (Rumah Tangga)
1	2010	1.856
2	2011	1.957
3	2012	1.968
4	2013	2.120
5	2014	2.190
<b>Jumlah rata-rata Masyarakat menerima Raskin</b>		<b>2.018</b>

*Sumber: Data diolah dari kantor BKKBN Kecamatan Sukoharjo*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima raskin di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan, sedangkan tujuan suatu program penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan atau menjadikan masyarakat miskin berada pada taraf kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan memiliki



kehidupan yang layak. Dalam hal ini bahwa untuk tercapainya kesuksesan suatu program raskin di suatu daerah atau kecamatan, harus memenuhi seluruh indikator 6T ketepatan raskin, berdasarkan data pada lapangan bahwa diperoleh data sebagai berikut:

1. Tepat sasaran adalah Program raskin diberikan secara tepat kepada Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan hasil kuisisioner di lapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima raskin sebesar 88,7% setiap bulannya berpenghasilan tidak kurang dari Rp.500.000, hal ini membuktikan bahwa masyarakat penerima beras miskin (raskin) sebagian besar adalah masyarakat yang keadaan ekonominya sudah dikatakan mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, adapun juga bagi RTS-PM yang alas rumahnya minimal adalah semen hanya berjumlah 50 orang atau 52,6% atau lebih dari setengah jumlah responden , berdasarkan hal tersebut bahwa masyarakat penerima bantuan raskin sudah memiliki perumahan yang layak huni dan beralaskan keramik. Sedangkan masyarakat yang memiliki lahan pertanian sebesar 75 orang atau 79% dari jumlah penerima responden. Berdasarkan hal ini bahwa sebesar 79% RTS-PM memiliki lahan pertanian. Sehingga berdasarkan hasil jawaban kuisisioner oleh responden diatas bahwa raskin di Kecamatan Sukoharjo belum tepat sasaran, karena berdasarkan keadaan masyarakat penerima raskin hampir keseluruhan masyarakatnya digolongkan keluarga mampu, sehingga sudah tidak berhak lagi menerima bantuan raskin.

2. Tepat Jumlah adalah jumlah beras raskin yang diberikan adalah sebesar 10-15 KG untuk setiap Kepala Keluarga

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan menunjukkan bahwa 95 RTS-PM mengatakan bahwa jumlah raskin yang mereka terima sebesar 10-15 KG. Menurut Ibu Ngatmini selaku Kepala BKKBN mengatakan bahwa jumlah raskin yang tidak sama diberikan dikarenakan bahwa masyarakat sudah dinyatakan mampu untuk tidak menerima raskin namun nama mereka masih tercantum sebagai penerima manfaat raskin sehingga jumlah raskin yang masih sisa diberikan kepada RTS-PM yang benar-benar membutuhkan. Sehingga berdasarkan kondisi diatas bahwa indikator tepat jumlah raskin dinyatakan terlaksana secara baik.

3. Tepat harga adalah harga beras raskin yang diberikan di setiap pekon atau daerah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp.1.600/KG.

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan menunjukkan bahwa 75 orang atau sebesar 79% RTS-PM menjawab bahwa mereka membeli beras raskin dengan harga yang sama setiap tahunnya yaitu Rp.1.600/KG. Adapun responden yang tidak membeli harga beras raskin seharga Rp.1.600/KG adalah sebanyak 20 orang atau sebesar 21%, menurut sebagian masyarakat harga raskin yang mereka terima tidak seharga Rp.1.600 adalah untuk membantu biaya pengangkutan ketika beras raskin di bawa ke titik bagi. Namun masyarakat tidak pernah keberatan untuk membantu biaya yang dikeluarkan lebih dari harga yang semestinya,

menurut bapak Daud dari Pekon Sukoharjo III biasanya harga beras raskinnya hanya dikenakan biaya Rp. 2.000/KG. Berdasarkan kondisi tersebut bahwa indikator tepat harga raskin di Kecamatan Sukoharjo sudah terlaksana secara baik dan tepat.

4. Tepat waktu adalah pendistribusian beras raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin (RTSPM) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu sebulan sekali.

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan menunjukkan bahwa 100% masyarakat menjawab tidak. Menurut Kepala BKKBN mengatakan bahwa di Kecamatan Sukoharjo waktu pendistribusian raskin tidak pernah menentu. Raskin hanya diberikan kepada masyarakat pada saat musim paceklik saja atau pada saat masyarakat mengalami gagal panen, dan itupun tidak pernah pasti kapan waktu pendistribusiannya. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat waktu belum terlaksana dengan baik, bahwasannya telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah raskin diberikan setiap bulannya.

5. Tepat kualitas adalah kualitas beras raskin yang baik dan layak untuk dikonsumsi

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan bahwa sebanyak 70 orang atau sebesar 73,7% RTS-PM mengatakan bahwa kualitas beras raskin masih sangat rendah. Hal ini dibenarkan oleh ketua BKKBN beliau mengatakan bahwa kualitas beras yang masih rendah dipengaruhi karena adanya banyaknya penumpukan beras di gudang dan juga tumpukan

karung yang berisikan beras tersebut selalu di semprot pestisida untuk menghindari kualitas beras yang rusak seperti timbulnya beras yang berulat, akan tetapi menimbulkan dampak aroma dan rasa yang tidak enak pada beras raskin ketika dimasak. Adapun sebagian warga mensiasatinya dengan menggunakannya sebagai campuran dengan beras yang berkualitas bagus pada saat di masak, bahkan ada sebagian masyarakat yang memanfaatkannya sebagai pakan ayam. Hal ini mengakibatkan program beras miskin (raskin) bertolak belakang dengan fungsi dan tujuan awal program tersebut diterapkan. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat kualitas program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum terlaksana dengan baik.

6. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan sebanyak 40 orang atau sebesar 42% RTS-PM mengatakan tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerimaan raskin. Berdasarkan hal tersebut bahwa dapat dikatakan indikator tepat administrasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum terlaksana dengan baik, karena adanya masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi oleh rumah tangga sasaran.

Berdasarkan 6 (enam) indikator program raskin diatas bahwasannya program raskin di Kecamatan Sukoharjo dapat diartikan belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidak tepatan sasaran yang belum terpenuhi

secara penerapannya di lapangan selama 5 tahun kebelakang. Ketidak tepat sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh penulis terdapat adanya rumah tangga yang kurang mampu tidak mendapatkan manfaat beras subsidi dari pemerintah, dan ada juga masyarakat yang terbilang mampu masih mendapatkan manfaat beras subsidi tersebut. Karena sebagian besar penerima bantuan raskin di Kecamatan Sukoharjo ini masyarakat yang keadaan perekonomiannya cukup baik dalam hal ini sebagian besar dari mereka memiliki lahan pertanian. Walaupun para petani tidak dapat merasakan hasil dari apa yang mereka tanam setiap harinya namun mereka masih dapat memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga mereka dengan mengandalkan pendapatan dari hasil panen raya mereka untuk beberapa bulan kedepan. Masih banyak masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Sukoharjo belum merasakan manfaat adanya program raskin ini, seperti para rumah tangga pendatang yang status ekonominya dikatakan tidak mampu namun belum terdata oleh pihak kelurahan atas hak mereka menerima raskin. Ada juga masyarakat yang sudah dikatakan mampu namun masih menerima raskin karena tidak ada pendataan ulang dari pihak kelurahan sehingga masih diberikan beras raskin namun tidak sebesar 15 kg.

Dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat raskin seharusnya benar-benar dilakukan secara objektif tidak semata-mata memandang anggota keluarga lurah saja, yang keadaannya sudah mampu namun ingin mendapat bantuan raskin juga dengan dalih jika tidak diberikan tidak ikut serta dalam pembangunan desa. Padahal raskin yang mereka

peroleh tidak begitu memberikan manfaat bagi keluarga yang mampu membeli beras yang kondisinya lebih layak dikonsumsi, sehingga apabila raskin datang mereka menebus hanya untuk memberi makan ayam saja. Padahal masih banyak keluarga yang berhak merasakan manfaat beras subsidi tersebut.

Selain kurangnya tepat sasaran dalam pemberian beras raskin, adanya ketidak tepatan kualitas beras yang disubsidikan oleh pemerintah dengan harga tebusan yang sangat murah sangat berpengaruh terhadap manfaat program raskin itu sendiri terhadap masyarakat di Kecamatan Sukoharjo.

Merujuk pada tujuan raskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Sehingga raskin diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga tidak mampu dan dapat menekan biaya pengeluaran keluarga miskin sehingga uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Namun pada kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat mengatakan bahwa beras yang mereka beli memiliki aroma dan rasa yang tidak enak. Bukan tanpa alasan hal ini terjadi, itu disebabkan karena adanya proses penyemprotan karung beras yang dilakukan digudang penyimpanan sebelum beras raskin didistribusikan sampai ke tangan masyarakat untuk menghindari adanya beras yang rusak dan berulat sebagaimana yang telah dikatakan oleh ibu Ngatmini selaku ketua BKKBN. Meskipun demikian beras

raskin tetap layak untuk dikonsumsi namun sebagian masyarakat menyiasatinya dengan cara menggunakannya sebagai campuran ketika mereka memasak nasi, seharusnya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dalam membeli beras, namun mau tidak mau masyarakat mengeluarkan uang lagi untuk membeli beras dengan kualitas bagus. Seharusnya uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk keperluan lain, tetapi mereka harus menyisihkan uang untuk membeli beras lagi.

Selain sebagian masyarakat mendapatkan beras raskin dengan kualitas yang kurang baik, ketidak tepatan waktu dalam pembagian beras membuat masyarakat enggan untuk menebus beras raskin walaupun dengan harga murah. Bapak Boijan mengatakan bahwa dalam setahun tidak mesti berapa kali beras raskin dibagikan kepada masyarakat, padahal masyarakat setiap harinya harus makan. Kualitas yang kurang baik juga yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk menebus beras raskin tersebut. Meskipun kualitas raskin dirasa kurang layak namun masih ada sebagian warga yang merasa sangat membutuhkan walaupun hanya digunakan sebagai campuran setidaknya mereka dapat menghemat uang dalam membeli beras.

Meskipun demikian indikator tepat harga di Kecamatan Sukoharjo sudah terlaksana dengan baik. Seluruh masyarakat penerima raskin di kecamatan Sukoharjo mengatakan ketepatan harga yang diberikan sesuai dengan kebijakan pemerintah tidak ada pembedaan dalam menetapkan harga beras dari bulan-kebulan.

Dalam pendistribusian beras raskin sudah banyak masyarakat yang menerima jumlah raskin sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 10-15 KG/per bulan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang dianggap mampu masih terdata sebagai rumah tangga penerima manfaat raskin. Seperti pada Pekon Sinar Baru dari beberapa warga yang dikatakan sudah mampu hanya diberikan 10 Kg bahkan bisa kurang, dan akan diberikan kepada rumah tangga yang benar-benar membutuhkan

Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program raskin di kecamatan sukoharjo belum memenuhi 6 (enam) indikator tercapainya program raskin. Karena hanya 2 indikator saja yang sudah tercapai dengan baik yaitu indikator ketepatan harga dan ketepatan jumlah program raskin. Untuk tercapainya kesuksesan suatu program raskin dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi atau berjalan dengan baik.

## **B. Implementasi Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi, *pertama* peningkatan kemampuan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. *Kedua* peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya



dan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua yang mengukur kesejahteraan masyarakat karena adanya program raskin, maka data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 1. Tingkat Kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia. Kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan akan makan, perumahan, kesehatan dan perlindungan, dari kebutuhan dasar tersebut tingkat kebutuhan yang berpengaruh dengan adanya program raskin, yaitu:

##### a. Tingkat Kebutuhan Pangan/kebutuhan akan makan

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat penting, karena manusia harus memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Pada tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga sangat mementingkan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

Berdasarkan data pada lapangan, bahwa seluruh masyarakat penerima raskin sudah terpenuhi tingkat kebutuhan pangannya. Dari hasil kuisioner menyatakan bahwa pola makan masyarakat penerima

raskin sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yaitu minimal dua kali dalam sehari dan juga masyarakat yang mengkonsumsi ikan dalam dua kali seminggu sebanyak 80 responden atau sebesar 84,2%. Berdasarkan hal ini bahwa kondisi masyarakat penerima raskin sudah terpenuhi dari segi kebutuhan pangan. Mengingat bahwa program raskin di Kecamatan Sukoharjo tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu dalam pendistribusiannya kepada masyarakat yang mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang sudah dinyatakan mampu tetap menerima beras raskin sehingga tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat penerimanya, karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sebelum menerima bantuan program raskin dan juga tidak menentu waktu pendistribusiannya, dengan begitu program raskin tidak begitu memberikan dampak baik bagi rumah tangga/keluarga, karena pada dasarnya rumah tangga/keluarga harus memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya, jika keluarga hanya mengandalkan beras subsidi, tingkat kebutuhan pangan keluarga tidak akan terpenuhi. Hal ini dapat dikatakan bahwa program raskin tidak bisa dijadikan sebagai penjamin kebutuhan pokok keluarga, tapi hanya dapat mengurangi beban kebutuhan pokok keluarga. Karena pendistribusian beras raskin di Kecamatan Sukoharjo tidak dilaksanakan secara rutin setiap bulannya, akan tetapi hanya dikeluarkan atau diberikan jika masyarakat sangat membutuhkannya, seperti gagal panen atau paceklik.

#### b. Tingkat Perumahan

Rumah merupakan struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil kuisioner di lapangan bahwa 90 rumah tangga penerima raskin sudah memiliki hak atas kepemilikan rumah masing-masing sedangkan 5 responden penerima raskin kondisi perumahannya masih mengontrak. Berdasarkan kondisi tersebut bahwa tingkat perumahan masyarakat penerima raskin di Kecamatan Sukoharjo sudah dikatakan layak huni atau layak pakai. Berdasarkan data pada lapangan, bahwa sebagian besar masyarakat penerima raskin memang keluarga yang sudah dikatakan keluarga mampu sebelum mereka menerima program raskin . Sehingga dengan adanya program raskin tidak begitu memberikan dampak secara signifikan terhadap tingkat perumahan masyarakat penerima. Karena program raskin hanya bersifat bantuan beras subsidi yang meringankan kebutuhan rumah tangga miskin sehingga mereka mampu menekan jumlah pengeluaran akan kebutuhan pokok dalam keluarganya.

#### c. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya pangan, sandang, kesehatan.

---

<sup>2</sup> UU RI No. 4 Tahun 1992

Kesehatan masyarakat kecamatan sukoharjo dapat terlihat dalam penanganan kesehatan, kecamatan sukoharjo sering mengadakan pelayanan kesehatan seperti, posyandu, program KB, dan sebagainya yang terjadwal setiap bulannya sehingga bayi dan orang tua tidak khawatir akan kesehatannya. karena rutin ikut serta dalam pelayanan dibidang kesehatan.

Berdasarkan hasil kuisioner menyatakan bahwa sebesar 68,4% masyarakat sudah peduli akan kondisi kesehatannya, sehingga ketika diserang rasa sakit langsung menuju ke Puskesmas. Program raskin tidak memberikan dampak terhadap tingkat kesehatan masyarakat penerima raskin, karena di Kecamatan Sukoharjo banyaknya masyarakat penerima raskin sudah dikatakan mampu sehingga segala kebutuhan bagi keluarganya sudah tercukupi dengan baik, raskin hanya berfungsi mengurangi pengeluaran rumah tangga masyarakat akan kebutuhan pokok. Dengan adanya program raskin yang tidak rutin dalam pendistribusiannya mengakibatkan masyarakat yang masih kurang terpenuhi untuk kebutuhan pangannya terutama akan kebutuhan beras sehingga masyarakat tetap harus menyisihkan hasil pendapatannya untuk membeli beras. Sehingga dalam hal ini bahwa apabila program raskin mampu memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan masyarakatnya, karena apabila manusia terpenuhi kebutuhan pangannya secara langsung kesehatannya terjaga. Berdasarkan kondisi

tersebut bahwa implementasi program raskin di Kecamatan belum mampu meningkatkan kesehatan masyarakat.

d. Tingkat perlindungan

Berdasarkan data pada lapangan bahwa masyarakat penerima raskin di Kecamatan Sukoharjo dimudahkan dalam kepengurusan surat menyurat kependudukan seperti dalam pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan seperti halnya diberikan kemudahan dalam kepengurusan Kartu Keluarga, KTP dan sebagainya. Berdasarkan implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum terlaksanan dengan baik sehingga program raskin belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Program raskin hanya mampu melindungi masyarakat dari rasa lapar pada saat bantuan tersebut di distribusikan kepada masyarakat penerima, mengingat bahwa beras raskin tidak diberikan secara tepat waktu kepada masyarakat.

2. Tingkat Kehidupan

Tingkat kehidupan manusia merupakan unsur-unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan, yang bertujuan mampu bersaing dimasanya dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih layak. Dalam meningkatkan taraf kehidupan ada beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu tingkat pendapatan dan tingkat

pendidikan. Dari kedua tingkat kehidupan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil usaha oleh kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga setiap harinya.

Tingkat pendapatan masyarakat Kecamatan Sukoharjo berpengaruh terhadap suatu pekerjaan masyarakat, pada umumnya sebagian besar pekerjaan masyarakat Kecamatan Sukoharjo adalah dibidang pertanian dan perkebunan, dengan demikian sebagian besar masyarakat Kecamatan Sukoharjo bergantung pada alam. Dengan demikian jika pendapatan bergantung pada alam atau hasil bumi tidak bisa menjadi patokan tingkat pendapatan yang lebih baik, karena terdapat banyak musim yang dihadapi. Pendapatan masyarakat penerima raskin dikecamatan Sukoharjo sudah dikatakan layak dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga meskipun tidak memiliki pendapatan yang tetap, akan tetapi masih berada pada batas minimal penghasilan masyarakat yaitu Rp. 500.000/bulan, karena berdasarkan data pada lapangan bahwa masyarakat penerima raskin sebagian besar sudah dinyatakan mampu. Dengan adanya program raskin dapat memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin, hal ini terlihat pada saat gagal panen atau paceklik beras raskin tersebut di

distribusikan, akan tetapi rumah tangga/keluarga merasa tidak cukup dengan pemberian manfaat tersebut.

Berdasarkan implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum terlaksana dengan baik sehingga tidak memberikan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat, karena mengingat kualitas beras raskin itu sendiri masih belum layak konsumsi sehingga masyarakat tetap membeli beras dengan kualitas yang layak untuk dikonsumsi sebagai campuran ketika akan dimasak. Masyarakat tetap mengeluarkan biaya ketika mereka menerima bantuan program raskin, sehingga dapat dinyatakan bahwa program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat penerimanya

#### b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban hidupnya tanpa mengandalkan bantuan orang lain.

Tingkat pendidikan masyarakat Sukoharjo ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan ke jenjang SMA dan Perguruan Tinggi. Tetapi hampir 50% dari penduduk warga Sukoharjo berpendidikan SMA.

Dampak adanya program raskin terhadap tingkat pendidikan di Kecamatan Sukoharjo tidak begitu bermanfaat, karena banyaknya pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi dan program raskin hanya sedikit mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan, jadi tidak begitu bermanfaat bagi peningkatan pendidikan, Sehingga tidak memungkinkan mengalokasikan dana untuk tingkat pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan pada kondisi diatas diketahui bahwa program raskin tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan masyarakat sebelum maupun sesudah menerima raskin tidak memiliki perubahan yang berdampak positif dari program raskin tersebut terhadap tingkat kesejahteraan keluarganya. Berdasarkan tingkat kebutuhan dasar keluarga penerima raskin bahwa sebagian besar mereka sudah dikatakan keluarga yang mampu sehingga untuk kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan mereka sudah tercukupi dengan baik sebelum mereka menerima bantuan raskin, sehingga program raskin di Kecamatan Sukoharjo hanya membantu masyarakat untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli beras, bukan berarti tidak mengeluarkan uang sama sekali, hanya mengurangi beban pengeluaran karena mengingat kualitas beras raskin belum layak konsumsi.

3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.



Berdasarkan data pada lapangan sebanyak 85 responden yang mengatakan bahwa tidak memiliki pilihan pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian bagi keluarga mereka yang lebih baik. Menurut Bapak Syamsiyah yang berada di Pekon Sukoyoso mengatakan bahwa sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan mereka sekarang ini, karena kemampuan yang mereka miliki pun sangat terbatas. Berdasarkan hal ini bahwa raskin tidak dapat memberikan dampak terhadap skala perekonomian masyarakat penerimanya, karena program raskin hanya bersifat bantuan dalam bentuk bahan pokok bagi rumah tangga miskin dan tidak berpengaruh terhadap kemampuan maupun keterampilan masyarakat.

### **C. Implementasi Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo Perspektif Ekonomi Islam**

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Berikut ini ayat yang menerangkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmmmin didunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kedzaliman dan arogansi, yaitu pada QS. An-Nahl (16) ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Dalam implementasi program beras untuk masyarakat miskin (raskin) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sukoharjo perspektif Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar dalam Ekonomi Islam yaitu:

#### 1) Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Dalam implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo termasuk tidak tepat sasaran dari pemberian manfaat beras subsidi, hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat/rumah tangga miskin yang tidak mendapatkan manfaat beras subsidi. Jadi implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum memenuhi keadilan.

#### 2) Pertanggung jawaban

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

Dalam implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo masih ada saja pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan ke maslahatan program ini dan dalam hal ini banyak pihak yang tidak amanah dalam tugasnya, karena masih ada saja yang memberikan manfaat beras subsidi kepada orang yang tidak tepat, seperti keluarga pihak yang mengelola, pihak yang mengelola, kerabat, bahkan masyarakat yang dipandang atau disegani mendapatkan manfaat beras subsidi. Jadi, masih adanya bentuk tidak tanggung jawab dalam implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo, sehingga tidak dapat terrealisasi dengan baik, hanya dipandang program pemerintah yang sia-sia/cuma-cuma. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada ketua BKKBN bahwa dalam pendistribusian beras raskin di setiap pekon penerima bantuan raskin tidak pernah adanya pengawasan dari pihak kecamatan, sehingga program raskin lepas dari pertanggung jawaban pemerintah, berdasarkan hal tersebut bahwa permasalahan program raskin yang terjadi di lapangan tidak dapat terselesaikan dengan jalan keluar yang baik, karena sudah lepas pertanggung jawaban aparat pemerintah dan tidak ada komunikasi yang baik antara pihak kecamatan dan kepala pekon.

### 3) *Tafakul* (jaminan sosial),

Adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program beras untuk masyarakat miskin (raskin)

merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Berdasarkan kondisi diatas, bahwasannya implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam belum dapat dikatakan adil dan tanggung jawab, karena belum adanya kesadaran pihak pengelola dan masyarakat dalam mewujudkan atau merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya suatu hubungan yang baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Studi Pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo) adalah sebagai berikut:

##### **1. Implementasi Program Raskin dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo**

Program Raskin di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2010-2014 tidak terlaksana secara baik. Berdasarkan data dari Kantor BKKBN di Kecamatan Sukoharjo menyatakan bahwa penerima raskin dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Program raskin di Kecamatan Sukoharjo belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan raskin, dimana indikator 6T tersebut sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program raskin di Kecamatan Sukoharjo. Dari indikator 6T yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, bahwa pada kenyataan di lapangan program raskin di Kecamatan Sukoharjo hanya memenuhi 2 (dua) indikator saja yaitu indikator tepat harga dan tepat administrasi.

Implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima raskin. Dari 3 indikator kesejahteraan masyarakat yaitu:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar
- b. Tingkat Kehidupan

Berdasarkan 2 indikator kesejahteraan masyarakat diatas, bahwa program raskin tidak mampu memenuhi seluruh indikator tersebut, oleh sebab itu program raskin di Kecamatan Sukoharjo tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima raskin. Karena program raskin hanyalah berupa bantuan subsidi beras dan tidak dapat menjamin kebutuhan dasar, tingkat kehidupan dan skala perekonomian masyarakat. Raskin di Kecamatan Sukoharjo sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam pembelian beras, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain.

## 2. Implementasi Program Raskin dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo menurut ekonomi Islam

Dalam implementasi program raskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukoharjo menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu:

- a. Keadilan
- b. Tanggung Jawab
- c. Tafakul (Jaminan Sosial)

Berdasarkan praktek di lapangan program raskin di Kecamatan Sukoharjo dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam hanya 1 (satu) yang telah terpenuhi yaitu Tafakul (Jaminan sosial) sebagai bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat.

Implementasi program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam menurut Imam Ghazali dapat dilihat dari fungsi kesejahteraan sosial, yaitu: *ad-Dharuriyat* (kebutuhan pangan), *Al-Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder), dan *Tahsiniyat* (kesempurnaan). berdasarkan implementasi program raskin di Kecamatan Sukoharjo, bahwa program ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan *Ad-Dharuriyat* saja yaitu hanya mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya turun lapangan langsung oleh pihak BKKBN untuk melihat bagaimana proses penyerahan beras raskin di Pekon-Pekon yang menerima raskin. Sehingga permasalahan yang ada di dalam penyerahan raskin dapat dengan mudah di evaluasi. Dengan demikian jumlah penerima raskin dari tahun ke tahun dapat berkurang dan sebagai bukti terwujudnya kesuksesan program raskin.

2. Di harapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang masih menerima program raskin untuk tidak menerima bantuan beras bersubsidi lagi, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat bantuan raskin tersebut.
3. Perlu ditingkatkan lagi kualitas beras raskin yang didistribusikan kepada masyarakat sehingga manfaat raskin dapat sepenuhnya dirasakan oleh rumah tangga sasaran penerima raskin.
4. Untuk penelitian lanjutan, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehinggadapat diketahui program mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan dicari bentuk sinergi atau kombinasi diantaranya agar efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lebih tinggi lagi.



## DAFTAR PUSATKA

- Adiwarman A. Karim, *ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, terjemah, soeroyo, Jakarta, Dana Bakti Wakaf, 2000
- Eriyanto, Teknik Sampling Analisis Opini Publik, LkiS, Yogyakarta:2010
- Garda Maeswara, *Biografi Prolitik Susilo Bambang Yudhoyono*, Penerbit Narasi :Jakarta,2009
- Hasil wawancara, Ketua BKKBN Kecamatan Sukoharjo
- Hasil wawancara, Ketua Camat Kecamatan Sukoharjo
- Husaini Usman dan Purnomo setiady, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta 2008.
- Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinnsip-prinsip Ekonomi Islam*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2008
- Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, *Penjelasan I : Pemantauan, Pengawasan Evaluasi, Audit dan Pelaporan (PETunnjuk Teksis Operasional)*, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kartono dan Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Masyhuri Dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, Refika Adutama, Bandung, 2008
- Moh. Thahah Hasan, *Islami dalam Perspektif Sosio Kultural*, Jakarta, Lantabora Press, 2005
- M.Iqbal hasan, Pokok-pokok Materi Statistik2,Bumi Aksara, Jakarta,2005
- M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandunng, Mizan, 2000
- M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000

Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Cetakan Pertama*, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010.

N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Salemba Empat, Jakarta, 2012

Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, *Memperdayakan kaum Miskin*, Yogyakarta; 2005

Rizky Monti S, *Pergeseran Kebijakan Penghentaskan Kemiskinan Bangladesh*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014

Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Soetrisno Hadi, *Metode Research*. I.Andi, Yogyakarta, 1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung

Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konsitusi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Sutrisno dan Hadi, *Metodologi Research*, jilid dua, Andi Offset, Yogyakarta, 2004

S.Nusution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta

Suharsim Arikuno, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta Ilmu, Jakarta, 2002

Wurajadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, P2LPTK, 2005

Veithzal Rivai dan ANdi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

## **Jurnal**

Biatna Dulbert Tampubolon “*Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Dan Faktor Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Organisasi Yang Telah Menerapkan SNI 19-9001-2001*”. Jurnal Standardisasi Vol. 9 No. 3 Tahun 2007

Jurnal perikanan dan kelautan, *analisis pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan danau bawah kecamatan dayun kabupaten Siak provinsi Riau*

Sujianto, Ernawati, Hasim As’ari, Mayarni, “Implementasi Program Raskin Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat” *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012*

Nienik H Samsul. *Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing Dan Variable Costing Untuk Harga Jual Cv. Pyramid*. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013

## **WEB**

<http://www.bps.go.id/linkTabelDinamis/view/id/1119>,

<http://bulog.go.id/>, “*Program Beras untuk Keluarga Miskin*”

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/beras-miskin/>

Ilyas Alimudin, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, <http://makasar.tribunnews.com>, diakses tanggal 22 Mei 2016

Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, *Al-Falah As Sunnah*, <http://www.qaradaghi.com>

**Tabel 1.2**  
**Tabel Kuisisioner**

No	Variabel	teori	Indikator	Kuisisioner
1	Program beras untuk masyarakat miskin(x)	<p>Beras untuk masyarakat miskin (raskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energy dan protein.</p> <p>(<a href="http://www.tnp2k.go.id/id">http://www.tnp2k.go.id/id</a>, “beras-raskin”, h.1 diakses 17 mei 2016)</p>	<p>Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu <u>industri</u> untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak <u>buruh</u> (seperti dalam subsidi <u>upah</u>). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan <u>ekspor</u>; subsidi di beberapa bahan <u>pangan</u> untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di <u>wilayah perkotaan</u>; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi <u>pertanian</u> dan mencapai swasembada produksi pangan.<sup>[1]</sup></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah beras raskin yang disubsidikan oleh pemerintah memberikan manfaat bagi keluarga anda?</li> <li>2. Apakah beras raskin dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga anda? Terutama pada beban pengeluaran pokok.</li> <li>3. Apakah jumlah beras raskin (kg) yang di subsidikan oleh pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga anda?</li> </ol>

			Tepat harga yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan sesuai atau tidak dengan keadaan pada implementasinya, sesuai atau tidak terhadap penghasilan Rumah Tangga Sasaran (RTS), dan sesuai atau tidak dengan kualitas berasnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda membeli beras dengan harga yang sama dari tahun ke tahun?</li> <li>2. Apakah menurut anda dengan harga raskin yang murah, kualitas beras layak untuk dikonsumsi?</li> </ol>
			Tepat sasaran penerima manfaat yaitu raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan di beri identitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pendapatan keluarga anda setiap bulan minimal Rp.500.000?</li> <li>2. Apakah rumah anda berlantakan semen ?</li> <li>3. Apakah keluarga bapak/ibu memiliki lahan pertanian?</li> </ol>
			Tepat Administrasi yaitu dalam pembelian beras raskin administrasi yang diberikan sesuai atau tidak dengan kebijakan yang ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada biaya administrasi diluar kebijakan pemerintah yang diberlakukan dalam pengambilan beras raskin?</li> <li>2. Apakah prosedur pengambilan beras raskin sangat mudah?</li> </ol>
			Tepat waktu yaitu dalam pemberian beras raskin apakah sesuai dengan waktu yang dijanjikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda menerima raskin sesuai jadwal?</li> </ol>
2	Kesejahteraan Masyarakat (y)	Kesejahteraan masyarakat suatu kondisi masyarakat yang menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam	1. Tingkat kebutuhan dasar : makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah keluarga anda minimal makan dua kali dalam sehari?</li> <li>2. Apakah keluarga anda bertempat tinggal pada tanah milik sendiri?</li> </ol>

		<p>mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi, <i>pertama</i> peningkatan kemampuan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan. <i>Kedua</i> peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. <i>Ketiga</i>, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Apakah jika keluarga anda sakit langsung menuju ke Puskesmas?</li> <li>4. Apakah keluarga anda minimal seminggu sekali mengkonsumsi telur?</li> <li>5. Apakah keluarga anda diberikan kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran/KTP dan sebagainya?</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tingkat kehidupan: tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah keluarga anda memiliki penghasilan tetap?</li> <li>2. Apakah jenjang pendidikan keluarga anda minimal SMP?</li> <li>3. Apakah seluruh anggota keluarga anda mengenyam bangku pendidikan?</li> <li>4. Apakah keluarga anda pernah mengenyam pendidikan non formal, misal les ?</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan suatu penunjang pekerjaan di daerahnya guna untuk meningkatkan atau memperluas skala ekonomi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada pekerjaan lain yang dapat menunjang perekonomian keluarga anda?</li> </ol>

**DAFTAR NAMA RESPONDEN**  
**PENERIMA BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

NO	NAMA (bapak/ibu)	PEKON	USIA (tahun)	PEKERJAAN
1	Boijan	Sinar baru	50	Petani
2	Jumono	Sinar baru	50	Buruh
3	Solehkan	Sukoharjo 1	35	Petani
4	Nono	Sukoharjo 1	55	Petani
5	Sarodan	Sukoharjo 1	40	Pedagang
6	Teguh	Sukoharjo II	30	Petani
7	Ikin	Sukoharjo II	41	Buruh
8	Idris	Sukoharjo II	45	Petani
9	Sulaingking	Sukoharjo II	50	Pedagang
10	Ngatemin	Sukoharjo II	39	Buruh
11	Bahum	Sukoharjo II	31	Petani
12	Bapak Rubiono	Sukoharjo II	44	Petani
13	Bapak Jumikun	Sukoharjo II	42	Petani
14	Bapak Asep	Sukoharjo II	40	Petani
15	Bapak Poniran	Sukoharjo III	44	Petani
16	Bapak Pardi	Sukoharjo III	50	Pedagang
17	Bapak Slamet	Sukoharjo III	55	Buruh
18	Ibu Turinem	Sukoharjo III	60	Ibu rumah tangga
19	Bapak Sumiran	Sukoharjo III	38	Pedagang
20	Bapak Misnan	Sukoharjo IV	40	Petani
21	Ibu Sariem	Sukoharjo IV	45	Ib rumah tangga
22	Ibu Aisyah	Sukoharjo IV	45	Ibu rumah tangga
23	Bapak Dedeh	Sukoharjo IV	55	Petani
24	Bapak Saprudin	Sukoharjo IV	40	Pedagang
25	Bapak Nasir	Panggung rejo	37	Buruh
26	Bapak Jumikun	Panggung rejo	60	Petani
27	Bapak Slamet	Panggung rejo	65	Buruh
28	Bapak Poniran	Panggung rejo	39	Petani
29	Ibu Paikem	Panggung rejo	40	Ibu rumah tangga
30	Bapak Sarijan	Pandan sari	40	Petani
31	Bapak Tono	Pandan sari	29	Pedagang
32	Bapak Putra	Pandan sari	35	Petani
33	Bapak Giono	Pandan sari	55	Buruh

34	Bapak Wario	Pandan sari	40	Buruh
35	Bapak Tusino	Pandan sari	45	Petani
36	Bapak Ade	Pandan sari	45	Petani
37	Bapak Suryadi	Pandan sari	39	Petani
38	Bapak Supriadi	Pandan sari	27	Pedagang
39	Bapak Rubino	Pandan sari	39	Petani
40	Bapak Reso	Pandan surat	31	Buruh
41	Ibu Jamilah	Pandan surat	50	Ibu rumah tangga
42	Bapak Amin	Pandan surat	49	Petani
43	Bapak Udin	Pandan surat	33	Buruh
44	Bapak Darmono	Pandan surat	37	Petani
45	Bapak Sugiono	Pandan surat	56	Buruh
46	Bapak Sugiono	Pandan surat	50	Buruh
47	Bapak Baikun	Pandan surat	45	Petani
48	Bapak Asmudi	Pandan surat	38	Pedagang
49	Bapak Pardi	Keputran	29	Petani
50	Bapak Wassito	Keputran	60	Petani
51	Bapak Badarudin	Keputran	56	Petani
52	Fisol	Keputran	40	Buruh
53	Rebi	Keputran	65	Petani
54	Winar	Sukoyoso	66	Buruh
55	Samsiyah	Sukoyoso	50	Petani
56	Turiyem	Sukoyoso	39	Ibu rumah tangga
57	Fa'in	Sukoyoso	35	Petani
58	Sodri	Sukoyoso	28	Buruh
59	Alfian	Siliwangi	35	Petani
60	Jaeroni	Siliwangi	33	Buruh
61	Si'un	Siliwangi	30	Pedagang
62	Roni	Siliwangi	40	Petani
63	Datam	Siliwangi	40	Buruh
64	Sukar	Waringinsari barat	30	Petani
65	Ibrahim	Waringinsari barat	33	Buruh
66	Atim	Waringinsari barat	38	Buruh
67	Yahya	Waringinsari barat	40	Buruh
68	Iwan	Waringinsari	28	Petani



		barat		
69	Muhi	Waringinsari barat	39	Buruh
70	Nasirun	Waringinsari barat	40	Buruh
71	Amad	Waringinsari barat	29	Petani
72	Jaeroni	Waringinsari barat	32	Buruh
73	Muhaimin	Waringinsari barat	40	Petani
74	Tari	Pandan sari selatan	35	Ibu rumah tangga
75	Dating	Pandan sari selatan	30	Pedagang
76	Bunawi	Pandan sari selatan	31	Buruh
77	Sadali	Pandan sari selatan	35	Buruh
78	Kailaini	Pandan sari selatan	55	Pedagang
79	Kasadin	Pandan sari selatan	40	Petani
80	Ngadiri	Pandan sari selatan	37	Petani
81	Sanun	Pandan sari selatan	67	Ibu rumah tangga
82	Samsudin	Sinar baru timur	40	Pedagang
83	Hasan dahrin	Sinar baru timur	40	Petani
84	Tisna	Sinar baru timur	33	Buruh
85	sarini	Sinar baru timur	45	Ibu rumah tangga
86	Sarno	Panggung rejo utara	40	Petani
87	Sirna	Panggung rejo utara	47	Ibu rumah tangga
88	Sukirin	Panggung rejo utara	27	Petani
89	Wagiyo	Panggung rejo utara	42	Pedagang
90	Wahono	Sukoharjo III barat	40	buruh

91	Daud	Sukoharjo III barat	40	Petani
92	Wagiati	Sukoharjo III barat	45	Petani
93	Sukirno	Sukoharjo III barat	38	Pedagang
94	tamirin	Sukoharjo III barat	40	Buruh
95	sutris	Sukoharjo III barat	50	Pedagang